



**Kebijakan Indonesia Dalam Mengatasi Dampak Negatif *China* –
*ASEAN Free Trade Area (CAFTA)***

***(Indonesia Policy On Overcome The Negative Impact Of China –
ASEAN Free Trade Area (CAFTA))***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan studi pada Program Studi ilmu Hubungan
Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh :

Rina Novia Putri
NIM 090910101010

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
2016



**Kebijakan Indonesia Dalam Mengatasi Dampak Negatif *China* –
*ASEAN Free Trade Area (CAFTA)***

***(Indonesia Policy On Overcome The Negative Impact Of China –
ASEAN Free Trade Area (CAFTA))***

SKRIPSI

Oleh :

**Rina Novia Putri
NIM 090910101010**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
2016**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya,
2. Calon pendamping hidup,
3. Guru-guru pengajar saya sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan Tinggi,
4. Almamater.



MOTTO

“Thousand Friends, Zero Enemy”

(Susilo Bambang Yudhoyono)¹

“Tidak pernah ada kebijakan yang bisa memuaskan semua pihak. Tetapi, kita harus memilihnya. Kita pilih yang paling tepat.”

(Susilo Bambang Yudhoyono)²

¹ Rico Afrido. 2013. *Sby Kembali Dengungkan Slogan Zero Enemy Million Friends*.
<http://nasional.sindonews.com/read/815880/12/sby-kembali-dengungkan-slogan-zero-enemy-million-friends-1386759948> diakses pada 9 Agustus 2016

² Susialo Bambang Yudhoyono. 2013. *Status Twitter*.
<https://twitter.com/sbyudhoyono/status/325631618033283072> diakses pada 9 Agustus 2016

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rina Novia Putri

NIM : 090910101010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kebijakan Indonesia Dalam Mengatasi Dampak Negatif *China – ASEAN Free Trade Area (CAFTA)*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 10 April 2016
Yang menyatakan

Rina Novia Putri
NIM. 090910101010

SKRIPSI

**KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENGATASI DAMPAK NEGATIF
*CHINA – ASEAN FREE TRADE AREA (CAFTA)***

Oleh :
RINA NOVIA PUTRI
090910101010

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Sri Yuniati, M.Si
Dosen Pembimbing Anggota : Honest Dody Molasy, S. Sos., MA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kebijakan Indonesia Dalam Mengatasi Dampak Negatif *China – ASEAN Free Trade Area (CAFTA)*” telah diuji dan disahkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Juni 2016
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :
Ketua

Drs. Djoko Susilo, M.Si.
NIP 1959083119899021001

Sekretaris I

Sekretaris II

Dra. Sri Yuniati, M.Si.
NIP 196305261989022001

Honest Dody Molasy, S.Sos., M.A.
NIP 197611122003121002

Anggota I

Anggota II

Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si.
NIP 196105151988021001

Adhiningasih Prabhawati, S.Sos., M.Si.
NIP 197812242008122001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Kebijakan Indonesia Dalam Mengatasi Dampak Negatif *China – Asean Free Trade Area (CAFTA)*: Rina Novia Putri. 090910101010; 2016; 79 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang terikat kerjasama dengan China melalui perjanjian *China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA)*. Kerjasama ini seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia karena dapat dengan mudah melakukan pertukaran barang dan jasa. Namun demikian kekuatan daya saing yang tidak seimbang antara Indonesia dan China menimbulkan beberapa dampak negatif bagi Indonesia. Salah satu tanda adanya dampak negatif yaitu semakin banyak produk manufaktur China yang membanjiri pasar domestik baik yang legal maupun ilegal. Oleh karena itu perlu campur tangan pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak negatif tersebut.

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan metode dimana data-data yang diperoleh dari data sekunder untuk menghasilkan data yang lebih komperhensif. Metode ini menafsirkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dengan teori yang telah dipelajari. Karya ilmiah ini menggunakan teknik studi pustaka yaitu data yang diperoleh secara langsung dari buku, surat kabar, dan dari sirus resmi yang penulis gunakan untuk menunjang data-data sekunder dalam karya ilmiah ini.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia membuat beberapa kebijakan untuk mengatasi dampak negatif CAFTA. Pemerintah mengeluarkan 3 kebijakan yaitu Pembatasan Tarif dan Kuota Impor, penguatan Ekonomi Berbasis UMKM, dan Pembangunan Infrastruktur. Tiga kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia dan mengoptimalkan keuntungan dari kerjasama CAFTA.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kebijakan Indonesia Dalam Mengatasi Dampak Negatif China – Asean Free Trade Area (CAFTA)**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan FISIP dan Bapak Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph. D., selaku Pembantu Dekan I FISIP yang selalu memberi kemudahan dalam proses pengesahan skripsi ini.
2. Dra. Sri Yuniati, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Honest Dody Molasy, S.Sos., MA., selaku Dosen Pembimbing Anggota.
3. Dosen Pembimbing Akademik Drs. Supriyadi, M.Si., yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen di jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 10 April 2016

Penulis

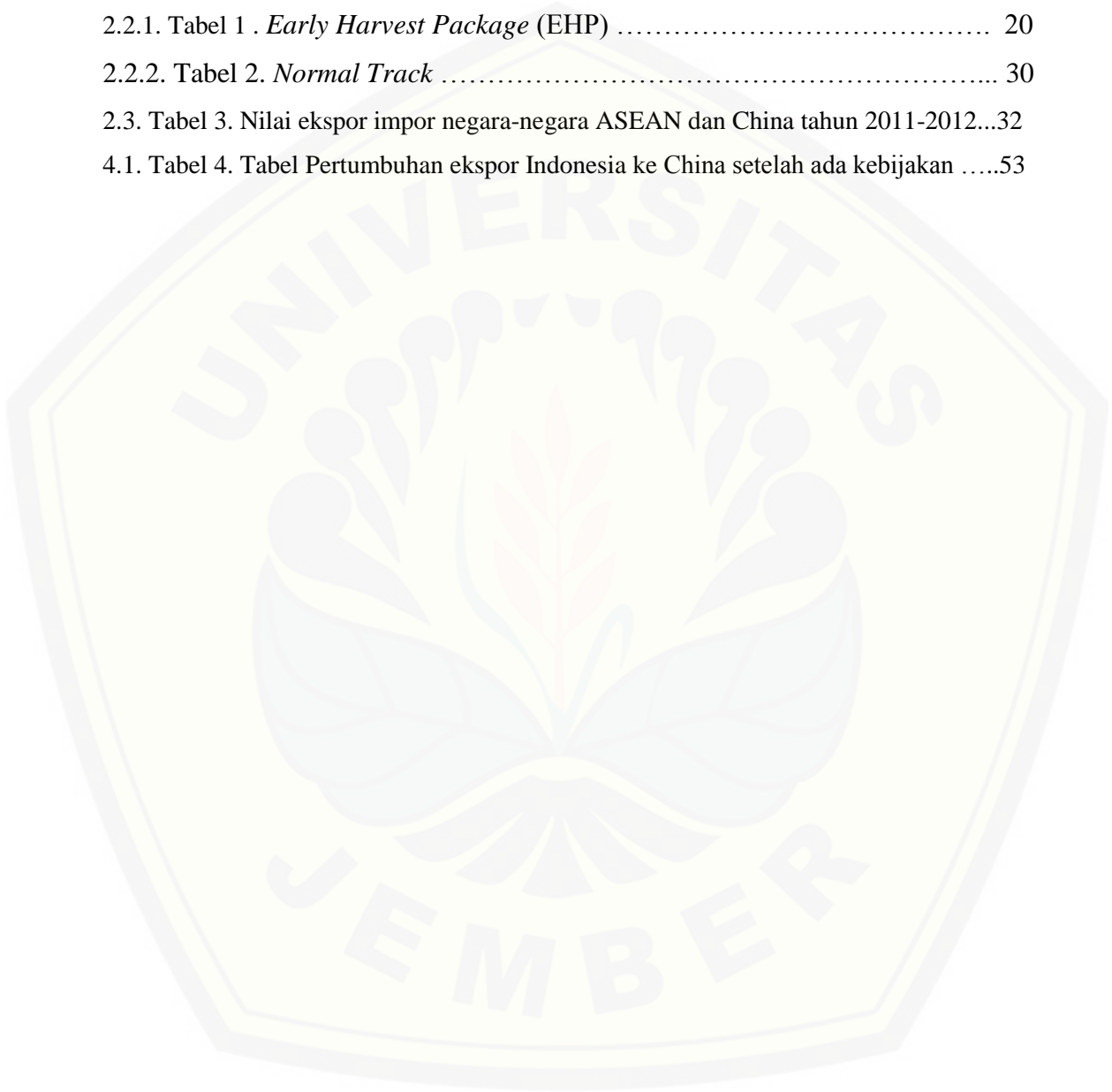
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.2.1 Batasan Materi	5
1.2.2 Batasan Waktu	6
1.3 Perumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kerangka Konseptual	6
1.5.1 Teori Liberalisasi Ekonomi	7
1.5.2 Konsep Kebijakan Publik	12

1.6 Argumen Utama	18
1.7 Metode Penelitian	18
1.7.1 Metode Pengumpulan Data	18
1.7.2 Metode Analisis Data	19
1.8 Sistematika Penulisan	19
BAB 2 KESEPAKATAN CHINA-ASEAN FREE TRADE AREA (CAFTA)	21
2.1 Proses Kesepakatan <i>China-ASEAN Free Trade Area</i> (CAFTA)	22
2.2 Proses Preferential Tariff Perdagangan CAFTA	29
2.2.1 <i>Early Harvest Package</i>	30
2.2.2 <i>Normal Track</i>	30
2.2.3 <i>Sensitive Track</i>	31
2.3 Pertumbuhan Ekspor dan Impor China dan negara anggota ASEAN	31
BAB 3 DAMPAK CHINA-ASEAN FREE TRADE AREA (CAFTA) TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA	35
3.1 Dampak Positif CAFTA	35
3.2 Dampak Negatif CAFTA	36
3.1.1 <i>Ketergantungan Ekonomi</i>	37
3.1.2 <i>Defisit Neraca Perdagangan</i>	38
3.1.3 <i>Deindustrialisasi</i>	41
BAB 4 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENGATASI DAMPAK NEGATIF CAFTA	46
4.1 Deregulasi tarif dan kuota impor	47
4.2 Penguatan Ekonomi Berbasis UMKM	54
4.3 Pembangunan Infrastruktur	60
BAB 5 KESIMPULAN	69
DAFTAR PUSTAKA	70

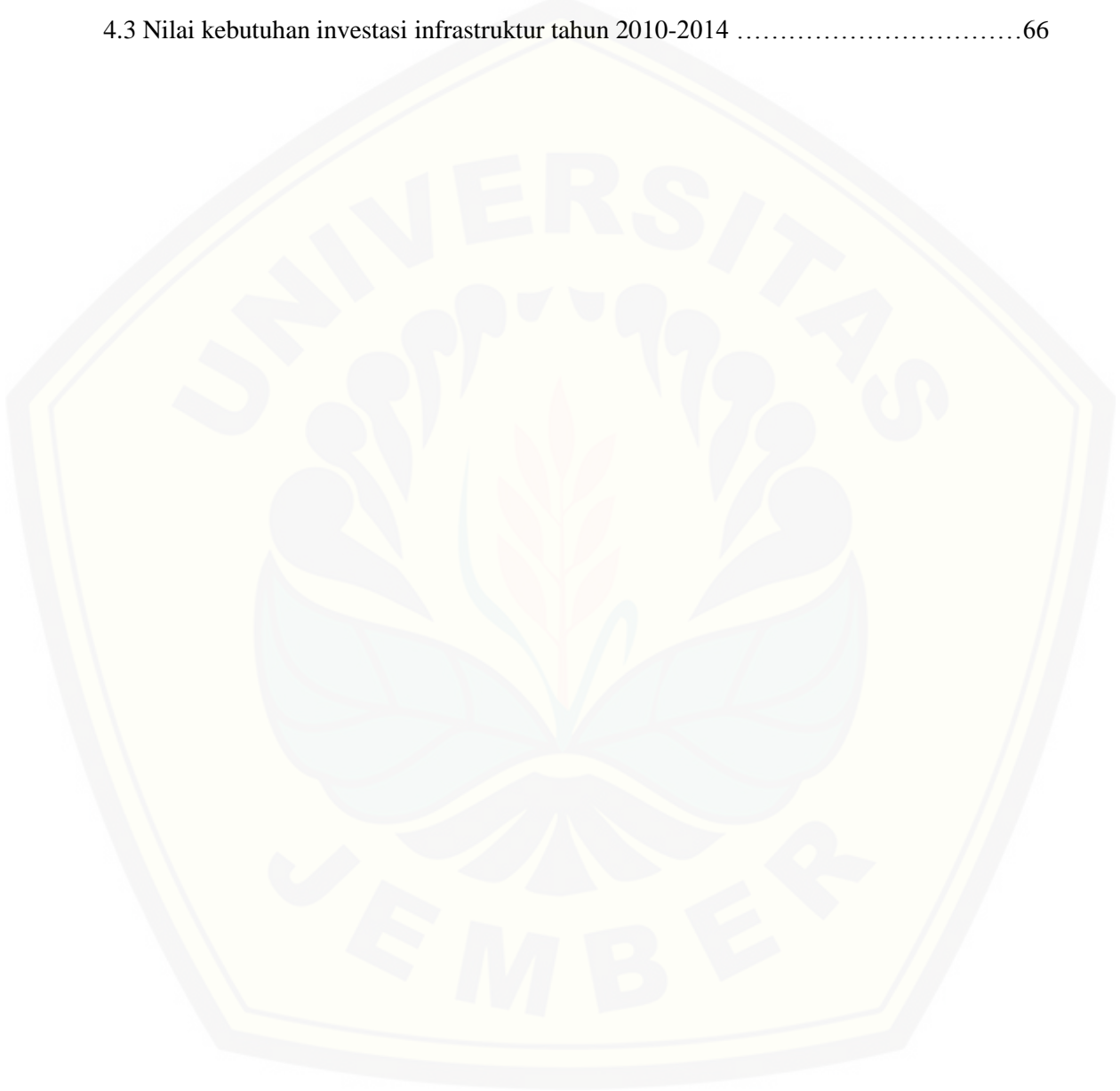
DAFTAR TABEL

	Halaman
2.2.1. Tabel 1 . <i>Early Harvest Package</i> (EHP)	20
2.2.2. Tabel 2. <i>Normal Track</i>	30
2.3. Tabel 3. Nilai ekspor impor negara-negara ASEAN dan China tahun 2011-2012...32	
4.1. Tabel 4. Tabel Pertumbuhan ekspor Indonesia ke China setelah ada kebijakan	53



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
2.1 Nilai perdagangan Indoneisa tahun 2003-2013	3
4.3 Nilai kebutuhan investasi infrastruktur tahun 2010-2014	66



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.5.2 Bagan analisis <i>China-ASEAN Free Trade Area</i> (CAFTA)	16



DAFTAR SINGKATAN

ACCORD	= <i>ASEAN-China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs</i>
ACJCC	= <i>ASEAN-China Joint Cooperation Committee</i>
ACSOC	= <i>ASEAN-China Senior Officials' Consultation</i>
ACWGDC	= <i>ASEAN-China Working Group on Development Cooperation</i>
ADB	= <i>Asian Development Bank</i>
AFTA	= <i>ASEAN Free Trade Area</i>
AMM	= <i>ASEAN Ministerial Meeting</i>
AMMTC	= <i>ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime</i>
API	= <i>Asosiasi Pertekstilan Indonesia</i>
ASAKI	= <i>Asosiasi Aneka Keramik Indonesia</i>
ASEAN	= <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BBM	= <i>Bahan Bakar Minyak</i>
BEI	= <i>Bursa Efek Indonesia</i>
BI	= <i>Bank Indonesia</i>
BM	= <i>Bea Masuk</i>
BMAD	= <i>Bea Masuk Anti Dumping</i>
BMTP	= <i>Bea Masuk Tindakan Pengamanan</i>
BPD	= <i>Bank Pembangunan Daerah</i>
BPEN	= <i>Badan Pengembangan Ekspor Nasional</i>
BUMD	= <i>Badan Usaha Milik Daerah</i>
BUMN	= <i>Badan Usaha Milik Negara</i>
CAFTA	= <i>China-ASEAN Free Trade Area</i>
CEPT-AFTA	= <i>Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area</i>
EHP	= <i>Early Harvest Package</i>
EPG	= <i>Eminent Persons Group</i>

HSL	= <i>Highly Sensitive List</i>
IFC	= <i>International Finance Corporation</i>
IIF	= <i>Indonesia Infrastruktur Fund</i>
IPO	= <i>Initial Public Offering</i>
ITPT	= Produk Industri Tekstil dan produk Tekstil
KKPE	= Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
KLBI	= Kredit Likuiditas Bank Indonesia
KPPI	= Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
KTT	= Konferensi Tingkat Tinggi
KUPS	= Kredit Usaha Pembibitan Sapi
KUR	= Kredit Usaha Rakyat
LSM	= Lembaga Swadaya Masyarakat
MEA	= Masyarakat Ekonomi ASEAN
MIGA	= <i>Multilateral Investment Guarantee Association</i>
OMA	= <i>orderly marketing agreement</i>
PAM	= <i>Property Asset Management</i>
PDP	= <i>Product Domestic Bruto</i>
Perpres	= Peraturan Presiden
PHK	= Pemutusan Hubungan Kerja
PMC	= <i>Post-Ministerial Conference</i>
PMK	= Peraturan Menteri Keuangan
PNPM	= Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
PPP	= <i>Public Private Partnership</i>
PUAP	= Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan
PUPERA	= Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
SEANWFZ	= Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara
SL	= <i>Sensitive List</i>
SMI	= Sarana Multi Infrastruktur
TAC	= <i>Treaty of Amity and Co-operation</i>

UMKM	= Usaha Mikro Kecil dan Menengah
VER	= <i>Voluntary eksport restraint</i>
VGF	= <i>Viability Gap Fund</i>
WEF	= <i>World Economic Forum</i>



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, hubungan antar negara semakin menyamarkan batas-batas negara. Hal ini menunjukkan bahwa setiap negara harus menyesuaikan diri agar dapat bertahan dengan cara kerjasama bilateral, regional maupun multilateral. Salah satu bentuk kerjasama regional di Asia Tenggara adalah *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). ASEAN merupakan organisasi antar negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan dibentuk oleh lima negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Tujuan mendirikan ASEAN seperti yang tercantum dalam persetujuan Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 salah satunya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar negara anggota ASEAN maka dibentuklah perjanjian kerjasama dengan negara di luar anggota. Salah satunya adalah *China - ASEAN Free Trade Area* (CAFTA). Perjanjian ini merupakan integrasi ekonomi regional, politik, sosial, budaya, dan pariwisata terutama menitikberatkan pada perdagangan bebas atau pasar bebas yang menyangkut ekspor impor antar anggota *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dengan China.³ Salah satu negara anggota ASEAN adalah Indonesia.⁴ Sebagai negara anggota, Indonesia diharuskan untuk melakukan kerjasama regional ASEAN dengan China. Ini pertanda bahwa mau tidak mau Indonesia wajib mengikuti dan mentaati perjanjian kerjasama ini. Indonesia meratifikasi kerjasama ini melalui Keputusan Presiden (Kepres) nomor

³ Syamsul Arifin, Rizal A. Djaafara, Aida S. Budiman. 2008. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Jakarta: PT Elex Media Computindo

⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2010. *ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-19 Tahun 2010*. <http://www.kemlu.go.id/Documents/ASP%202010.pdf> diakses pada 9 Maret 2016

48 tahun 2004 dan pada tanggal 1 Januari 2010 CAFTA resmi dibuka dengan tarif Bea Masuk (BM) 0%.⁵

Adanya kebijakan kerjasama regional CAFTA ini menandakan bahwa integrasi ekonomi melalui jalan liberalisasi perdagangan bebas khususnya antara Indonesia dan China.⁶ Liberalisasi faktor-faktor produksi yakni modal, tenaga kerja, jasa-jasa, dan investasi pada dasarnya menghapus hambatan tarif dan non tarif.⁷ Tentu setiap kebijakan selalu menuai pro dan kontra dalam realisasinya. Daya saing produk dan pembangunan infrastruktur kedua negara yang tidak seimbang menjadi hambatan bagi pelaku pasar di Indonesia.⁸

Ekspor merupakan salah satu sumber devisa yang sangat dibutuhkan oleh negara atau daerah yang perekonomiannya bersifat terbuka seperti di Indonesia, karena ekspor secara luas ke berbagai negara memungkinkan peningkatan jumlah produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan dapat memberikan andil yang besar terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomiannya.

⁵ Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN DEPLU RI. 2005. *ASEAN Selayang Pandang*. Halaman: 100 diakses pada 18 Maret 2016

⁶“H. Maryani. 2011. *Pengaturan Kesepakatan Perdagangan Bebas Regional Dalam Kerangka WTO*” <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29019/3/Chapter%20II.pdf> diakses pada 9 maret 2016

⁷ Syamsul Arifin, R. Winantyo, Yati Kurniati. 2004. *Integrasi Keuangan Dan Moneter Di Asia Timur*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Halaman: 2

⁸ Tri Atika Frebriany. 2014. *Perdagangan Bebas Asean-China Free Trade Areal (ACFTA) Terkait Industri Dan Iklim Investasi Di Indonesia*. Halaman: 6
<http://download.portalgaruda.org/article.php%3Farticle%3D141838%26val%3D2342%26title%3DPERDAGANGAN%2520BEBAS%2520ASEAN-CHINA%2520FREE%2520TRADE%2520AREAL%2520> diakses pada 1 Maret 2016

Grafik 1 di bawah ini menunjukkan nilai perdagangan Indonesia dengan China tahun 2003 sebelum penurunan tarif pertama sampai tarif BM 0 % tahun 2013.⁹



Sumber : M. Iqbal Fauzan, Rahmat Romansah, Risma Safutri, dan Rissa Ladya. 2013. *Neraca Perdagangan Indonesia Defisit*. http://www.kompasiana.com/rissasha/neraca-perdagangan-indonesia-defisit_552b85f56ea8346b058b456b diakses pada 5 April 2016

Grafik 1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2003 hingga 2011 neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus ekspor dari pada impor. Apabila dilihat dari neraca di atas jumlah ekspor Indonesia lebih besar dari jumlah impor Indonesia. Tetapi grafik ini mengalami penurunan surplus yang cukup tajam pada tahun 2008 karena laju ekspor meningkat dengan diikuti oleh laju impor. Selanjutnya neraca perdagangan Indonesia mulai mengalami penguatan kembali pada tahun 2009 hingga 2011, namun pada tahun 2012 mengalami defisit sebesar 1.6 Miliar USD. Hal ini disebabkan karena melemahnya kegiatan ekspor pada tahun tersebut. Namun demikian penyebab yang lebih dominan mempengaruhi neraca perdagangan tahun 2012 adalah meningkatnya kegiatan impor.

Dari grafik di atas, kalangan bisnis Indonesia menunjukkan tanggapan yang beragam terhadap pelaksanaan CAFTA. Ernovian G Ismy, Sekjen Asosiasi

⁹M. Iqbal Fauzan, Rahmat Romansah, Risma Safutri, dan Rissa Ladya. 2013. *Neraca Perdagangan Indonesia Defisit*. http://www.kompasiana.com/rissasha/neraca-perdagangan-indonesia-defisit_552b85f56ea8346b058b456b diakses pada 5 April 2016

Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan kekhawatirannya atas pemberlakuan CAFTA yaitu berubahnya pola usaha yang ada dari pengusaha menjadi pedagang. Apabila berdagang lebih menguntungkan karena faktor harga barang-barang impor yang lebih murah maka akan banyak industri nasional dan lokal yang “gulung tikar” hingga akhirnya berpindah menjadi pedagang.¹⁰ Buktinya pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara tanah abang telah dibanjiri produk tekstil dari China pada tahun 2009. Bahkan Wakil Ketua Umum API Ade Sudrajat mengungkapkan bahwa nilai pasar tekstil Indonesia sebesar Rp 70 triliun yang artinya nilai produk Cina di pasar tekstil Indonesia hampir Rp 30 triliun karena menguasai 40 % pangsa pasar di Indonesia.¹¹

Pemicu kekhawatiran utama para pelaku industri dalam negeri yaitu China akan mendominasi mayoritas perekonomian Indonesia. Salah satu implikasi yang paling penting dari kesepakatan itu adalah meningkatnya angka pengangguran akibat tutupnya beberapa sektor manufaktur dan sektor-sektor produktif lainnya yang tidak dapat bersaing lagi.¹² Saat ini diperkirakan setidaknya terdapat 10 sektor manufaktur di Indonesia akan mengalami kesulitan secara total akibat pelaksanaan CAFTA. Sektor tersebut antara lain tekstil, dan produksi tekstil (TPT), industri makanan dan minuman, sepatu, petrokimia, peralatan pertanian dan industri mesin, serat sintetis, elektronik (termasuk kabel dan peralatan listrik lainnya), konstruksi dan baja.¹³

Dari beberapa dampak negatif di atas menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antar negara. Adanya

¹⁰Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK MIC Cikarang. 2013. *Bunuh Diri Perekonomian Indonesia Melalui CAFTA*. <http://bem.mic.ac.id/bunuh-diri-perekonomian-indonesia-melalui-acfta.html> diakses pada 5 April 2016

¹¹ Eka Utami Aprilia. 2009. *Tekstil China Kuasai Separuh Pasar Indonesia*. <https://m.tempo.co/read/news/2009/12/03/090211760/tekstil-cina-kuasai-nyaris-separuh-pasar-indonesia> diakses pada 10 Agustus 2016

¹² Asosiasi Pedagang Indonesia. 2010. *UMP DKI naik menjadi Rp 1.920.000,-*. <http://apidki-jakarta.weebly.com/berita/archives/11-2010> diakses pada 5 April 2016

¹³ Budiman Sudjatmiko. 2010. *Apakah di mungkinkan win-win solution? Pro dan kontra Asean China Free Trade Agreement (ACFTA)*. <http://www.fes.or.id/fes/download/Undangan-ACFTA%20TOR.pdf> diakses pada 5 April 2016

pasar bebas ini memang akan memicu pertumbuhan ekspor impor suatu negara. Namun jika pertumbuhan impor dalam suatu negara lebih tinggi daripada ekspor maka negara itu akan mengalami defisit neraca perdagangan. Dampak dari neraca pembayaran defisit adalah produsen dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produsen dari negara lain, pendapatan negara sedikit sehingga utang negara bertambah besar, dan perusahaan banyak yang gulung tikar sehingga pengangguran meningkat akibat dari PHK. Untuk mengatasi hal tersebut peran atau intervensi pemerintah sangat diperlukan karena sudah termasuk mengganggu stabilitas ekonomi negara. Oleh karena itu penulis mengambil judul :

“Kebijakan Indonesia Dalam Mengatasi Dampak Negatif *China – Asean Free Trade Area (CAFTA)*”

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Karya ilmiah diperlukan adanya suatu batasan ruang lingkup yang benar dan jelas. Supaya proses analisa suatu karya ilmiah tidak menjalar ke obyek yang lain di luar penelitian. Oleh karena itu, perlu diarahkan agar mempermudah perolehan data, memilah dan memilih informasi yang tepat. Dalam hal ini penulis menggunakan dua macam batasan yaitu batasan materi dan batasan waktu. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan penulis menggunakan materi dan waktu diluar batasan yang telah ditetapkan, selama hal tersebut masih berkaitan terhadap permasalahan yang ada.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi ini bertujuan untuk menunjukkan ruang lingkup pembahasan sebuah objek penelitian yang akan dianalisis. Untuk itu, penulis ingin memahami bagaimana proses kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam meminimalisir dampak negatif dari pelaksanaan CAFTA.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu ini digunakan untuk membatasi jangka waktu pengambilan data agar mempermudah penelitian. Penulis menggunakan jangka waktu data penelitian mulai tahun 2005 sampai dengan 2015. Karena CAFTA mulai diterapkan pada tahun 2005 dan sampai pada tahun 2015 beberapa kebijakan dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk memproteksi industri dalam negeri.

1.3 Rumusan Masalah

Salah satu hal yang terpenting dalam penelitian adalah permasalahan menarik yang muncul untuk membantu penulis tetap fokus terhadap ruang lingkup yang sudah ditentukan. Sesuai dengan latar belakang penulis mengambil rumusan masalah yaitu : **Bagaimana kebijakan Indonesia dalam mengatasi dampak negatif Cina – ASEAN Free Trade Area (CAFTA) ?**

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah upaya untuk memahami kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi dampak negatif pelaksanaan CAFTA. Setelah itu penulis berusaha membuat penilaian bagaimana implementasi kebijakan tersebut. Sehingga penulis dapat mengetahui kebijakan tersebut berhasil atau tidak.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka dasar pemikiran ini sangat mutlak diperlukan untuk menjelaskan dan menganalisis suatu objek agar lebih tertata secara sistematis. Dengan harapan dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis menggunakan Teori Liberalisasi Ekonomi dengan Konsep Kebijakan Publik dalam menganalisis karya ilmiah ini.

1.5.1 Teori Liberalisasi Ekonomi

Dalam hubungan internasional atau hubungan antar negara terdapat banyak ideologi untuk menganalisis fenomena internasional. Ideologi digunakan sebagai pemersatu rakyat suatu negara yang berusaha mengubah negara itu sendiri. Ideologi juga merupakan suatu pedoman untuk memilih kebijakan dan perilaku politik. Teori liberalisme merupakan sebuah paham yang dijadikan landasan sistem demokrasi dan sistem kapitalisme industri yang berkembang di dunia saat ini. Paham liberalisme mengusung tema kebebasan individu, kebebasan ekonomi, kebebasan politik dan meminimalisir campur tangan pemerintah.

Liberalisme adalah sebuah paham atau ideologi sedangkan sistemnya disebut liberalisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) liberalisasi diartikan sebagai proses (usaha dan sebagainya) untuk menerapkan paham liberal dalam kehidupan (tata negara dan ekonomi).¹⁴ Liberalisasi itu sesuatu yg *invariable*, yang berarti mau tidak mau kita harus mengikuti sistemnya yang akan mempengaruhi kehidupan sosiologi masyarakat, institusi negara dan meningkatkan demokrasi suatu negara. Selain itu liberalisme akan menciptakan *interdependency* (saling ketergantungan) antar negara.¹⁵ Karena saling ketergantungan antar negara akan lebih kooperatif dan berpikir dua kali untuk berkonflik. Kekuatan militer kurang berguna dalam sistem liberalis sedangkan kekuatan ekonomi dan instrumen institusional lebih berguna untuk menjaga keamanan dan perdamaian antar negara. Aktor-aktor transnasional lebih berperan aktif daripada negara. Untuk itu banyak negara melakukan liberalisasi untuk menciptakan dunia yang lebih baik.

Liberalisasi ekonomi saat ini menjadi fenomena dunia karena hampir setiap negara melakukan kerjasama dan perjanjian perdagangan bebas hubungan bilateral, regional maupun multilateral. Secara gambaran umum bentuk dari liberalisasi ekonomi yaitu bentuk liberalisasi perdagangan yang bergerak di sektor pertukaran

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. *KBBI Online*. <http://kbbi.web.id/liberalisasi> diakses pada 18 Maret 2016

¹⁵ Robert Jackson, Georg Sorensen. 2010. *Introduction to International Relations Theories and Approaches*. Oxford University Press. Halaman: 99-118

baik untuk barang, jasa, hak milik intelektual maupun investasi secara global bertujuan mereduksi *trade barriers* (hambatan perdagangan). Terdapat beberapa regulasi yang mencoba diaplikasikan oleh aktor transnasional kepada semua negara secara global. Hal ini karena beberapa negara ada yang memproteksi perekonomiannya dalam negeri sehingga regulasi domestik ini yang berusaha ditiadakan. Menurut penggagas konsep liberalis bahwa dengan adanya penerapan regulasi impor dan ekspor dapat mematikan pertumbuhan investasi modal dari negara investor begitu pula sebaliknya. Adanya regulasi membuat investor berpikir berkali-kali untuk menginvestasikan dananya maka dari itu penghapusan sekat – sekat tersebut yang dengan tidak langsung memakmurkan aliran perekonomian global .

Liberalisasi perdagangan ini tentu mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah ketika liberalisasi perdagangan melahirkan *trade creation*, dimana terjadi peralihan konsumsi dari produk domestik yang bersifat *high-cost* ke produk impor yang bersifat *low-cost* (yang dihasilkan oleh negara partner). Dampak positif dari liberalisasi perdagangan menurut David Ricardo menyempurnakan teori keunggulan absolut dari Adam Smith dengan mengemukakan teori keunggulan komparatif yang menyatakan bahwa dalam keadaan *free trade*, apabila salah satu negara kurang efisien dibandingkan negara lainnya dalam memproduksi kedua barang tersebut maka kedua negara masih dimungkinkan melakukan perdagangan dan menguntungkan kedua belah pihak.¹⁶ Sedangkan tanda dampak negatif dari liberalisasi perdagangan adalah apabila yang terjadi adalah *trade diversion*, yaitu peralihan konsumsi dari produk impor yang bersifat *low-cost* (yang dihasilkan oleh negara non anggota) ke produk impor yang bersifat *high-cost* (yang dihasilkan oleh negara partner kerjasama dalam FTA). Beberapa dampak negatifnya yaitu :

- 1) Ketergantungan ekonomi

¹⁶ Flora Susan Nongsina. 2007. *Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekspor-Impor Indonesia*. Parallel Session IB:Trade I (Policy) UI-Depok. Halaman: 4

CAFTA secara positif dipandang sebagai sebuah jalan untuk negara-negara anggota memperluas pasar luar negerinya melalui kerjasama dengan China. Theotonio Dos Santos menyatakan sebagai berikut:¹⁷

“Yang dimaksud dengan ketergantungan adalah dimana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, dimana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Hubungan saling tergantung antara dua sistem ekonomi atau lebih, dan hubungan antara sistem-sistem ekonomi ini dengan perdagangan dunia, menjadi hubungan ketergantungan bila ekonomi beberapa negara (yang dominan) bisa berekspansi dan bisa berdiri sendiri, sedangkan ekonomi negara-negara lainnya (yang tergantung) mengalami perubahan hanya sebagai akibat dari ekspansi tersebut, baik positif maupun negatif.”

Menurut teori ketergantungan Dos Santos yaitu jika ekonomi negara-negara pusat bergerak maju atau mundur bisa jadi ekonomi negara-negara pinggiran juga ikut maju atau mundur karena ekonomi negara-negara pinggiran tergantung negara-negara pusat. Namun demikian jika negara-negara pinggiran mengalami kesulitan bukan berarti ekonomi negara-negara pusat terkena dampaknya karena tidak tergantung ekonomi negara-negara pinggiran. Hal ini yang dinamakan “saling ketergantungan” tetapi tidak setara.

2) Defisit Neraca Perdagangan

Trade Balance (Neraca perdagangan) merupakan bagian dari *Current Account* (neraca transaksi berjalan) yang menghitung *net trade* dari barang (*merchandise goods*) yang merupakan selisih ekspor dengan impor perdagangan barang. Neraca perdagangan menyediakan informasi tentang ulasan dan performa perekonomian suatu negara dan juga pola perdagngan sebagaimana tergambar dalam perdagangan barangnya. Sedangkan Basuki Pujoyalwanto menyatakan sebagai berikut:

¹⁷ Arief Budiman. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Halaman: 63

“Neraca perdagangan adalah suatu catatan atau ikhtisar yang memuat atau mencatat semua transaksi ekspor dan transaksi impor barang suatu negara. Neraca perdagangan dikatakan defisit bila nilai ekspor yang lebih kecil dari impornya dan dikatakan surplus bila ekspor barang lebih besar dari impornya. Bisa dikatakan neraca perdagangan yang berimbang jika nilai ekspor suatu negara sama dengan nilai impor yang dilakukan negara tersebut.”¹⁸

Defisit neraca transaksi berjalan dapat diatasi salah satunya dengan cara meningkatkan ekspor dan mengurangi jumlah barang impor. Pada arus perdagangan, upaya untuk menjaga daya saing ekspor dan menekan impor dapat dipengaruhi oleh kebijakan nilai tukar terhadap valas. Perubahan nilai tukar terhadap valas dapat dipengaruhi dari perubahan harga barang-barang ekspor dan impor. Semakin tinggi harga barang yang diekspor, semakin turun nilai tukar mata uang negara pengekspor dan sebaliknya.

3) Deindustrialisasi

Deindustrialisasi merupakan proses kebalikan dari industrialisasi yaitu penurunan kontribusi sektor manufaktur alias industri pengolahan nonmigas terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB).¹⁹ Dalam konteks ini, penurunan juga terjadi dari aspek output produksi dan tenaga kerja sehingga sektor kegiatan manufaktur mengalami penurunan nilai tambah. Gejala ini juga kerap disebut deindustrialisasi negatif di tengah belum matangnya pertumbuhan ekonomi suatu negara seperti Indonesia. Menurut Stiglitz yaitu :²⁰

“Privatisasi terlalu dini tidak pernah menghitung pentingnya budaya korporatokrasi yang menyertai, menganggap remeh kesulitan dalam membangun lembaga yang diperlukan dan juga

¹⁸ Basuki Pujoalwanto. 2014. *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Jogjakarta: Graha Ilmu. Halaman: 251-261

¹⁹ Kementerian Perindustrian RI. 2013. *Deindustrialisasi Kembali Intai Indonesia*. <http://www.kemenerin.go.id/artikel/9202/Deindustrialisasi-Kembali-Intai-Indonesia> diakses pada 17 April 2016

²⁰ Muhammad Amien Rais. 2008. *Agenda-Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!*. Jogakarta : PPSK Press

melupakan bahwa banyak negara yang tidak atau belum memiliki pemerintahan yang dapat mengatur kompetisi secara adil.”

Negara-negara yang membuka lebar dirinya dalam perdagangan bebas, melakukan deregulasi pasar uang, mendadak memprivatisasi berbagai perusahaan milik negara dalam kenyataannya justru mengalami kemunduran sosial dan ekonomi. Negara mendapat serbuan investasi namun ketika sentimen pasar investasi berubah karena adanya perubahan sosial dan politik tertentu maka uang yang masuk akan segera ditarik keluar dan mengakibatkan kehancuran ekonomi salah satunya pengangguran meningkat. Dos Santos juga menyatakan sebagai berikut :²¹

“Proses industrialisasi yang tergantung mengalami kesukaran dalam memasarkan barang-barang dalam negeri. Karena pertama, upah yang dibayar kepada buruh industri sangat murah, supaya barang-barang industri ini bisa terjangkau bagi anggota masyarakat yang masih miskin ini. Akibatnya, daya beli par aburuh ini melemah. Kedua, teknologi padat modal yang dipakai membuat jumlah pekerjaan yang diciptakan menjadi lebih sedikit. Padahal, industri modern ini seringkali mematikan industri-industri sejenis yang dikelola secara tradisional, tetapi menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

- Kebijakan Pemerintah menurut liberalis

Menurut John Maynard Keynes melalui karyanya yang sangat monumental, *General Theory of Employment, Interest and Money* menyatakan bahwa:²²

“harus ada keseimbangan kekuatan antara negara dan pasar. Negara dan pasar masing-masing memiliki kelemahan. Untuk itu Keynes menawarkan kepaduan antara negara yang kuat dan pasar yang kuat. Keynes menawarkan adanya keterlibatan negara dalam memperkuat dan memperbaiki beroperasinya mekanisme pasar. Selama ini negara tidak diperkenankan menggunakan kekuasaannya dengan argumen kepentingan

²¹ Arief Budiman. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Halaman: 73

²² Sobri, 1987. *Ekonomi Makro*. Jogjakarta: BPFE UII. Halaman: 9

<https://eprints.uns.ac.id/8648/3/91800308200902403.pdf> diakses pada 5 April 2016

nasional yang merkantilistik sehingga akhirnya membunuh keseimbangan pasar. Keynes juga masih menjadi pejuang dalam rangka pasar bebas dalam segala bidang, termasuk di sini adalah perdagangan dan keuangan internasional. Ia menatap perlunya kehadiran pemerintah untuk mengontrol hal-hal yang berada di luar mekanisme pasar yang memakai logika *invisible hand*, terutama di sini adalah masalah yang muncul akibat ekonomi makro yakni inflasi dan pengangguran.”

Dari deskripsi teori Keynes di atas menunjukkan bahwa pentingnya sedikit kontrol negara untuk melindungi pasar domestik diantara gempuran pasar bebas. Kebijakan sebagai rangkaian kegiatan yang menghasilkan pemilihan berbentuk tindakan dari seperangkat alternatif tindakan secara sosial, yang dimaksudkan untuk menghasilkan keadaan khusus di masa mendatang yang dibayangkan oleh pembuat kebijakan.²³

1.5.2 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam politik luar negeri merupakan sebuah bentuk kebijakan campur tangan pemerintah dalam perekonomian suatu negara salah satunya terkait perdagangan bebas. Konsep kebijakan publik menurut David Easton sebagai berikut :²⁴

“Alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semua yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.”

Dari pengertian di atas pemerintah mempunyai kekuasaan yang sangat besar melakukan secara otoritatif untuk seluruh masyarakat. Namun demikian, hal tersebut

²³ Sarwendah Okky Liesindriyati dan Djoko Susilo. 2013. *Keputusan Uni Eropa Memberikan Financial Assistance Package Kepada Yunani Pada Tahun 2010*. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58880/Sarwendah%20Okky%20Liesindriyati.pdf?sequence=1> diakses pada 23 Maret 2016

²⁴ Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. 2008. Jogjakarta:CAPS. Halaman: 22-23

bukan berarti bahwa makna ‘kebijakan’ hanya milik atau domain pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial (Karang Taruna), dan lembaga-lembaga voluntir lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula. Namun demikian, kebijakan mereka tidak dapat diartikan sebagai kebijakan publik karena tidak dapat memakai sumber daya publik atau memiliki legalitas hukum sebagaimana lembaga pemerintah.

Ciri kebijakan publik yang utama menurut David Easton adalah orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yakni para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para raja/ratu dan lain sebagainya.²⁵ Mereka ini yang menurut Easton merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dan dianggap oleh sebagian besar warga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu.

Interaksi kebijakan menurut David Easton yang terjadi dalam bentuk masukan dan keluaran (*input* dan *output*).²⁶ Kekuatan-kekuatan yang timbul dari dalam lingkungan dan mempengaruhi suatu kebijakan politik dipandang sebagai masukan-masukan (*input*). Sedangkan hasil-hasil yang dikeluarkan oleh sistem politik yang merupakan tanggapan terhadap tuntutan-tuntutan tadi dipandang sebagai keluaran (*output*) dari kebijakan sistem politik. Output tersebut akan mendapat feedback (umpan balik) kembali ke input jika diterima oleh publik (masyarakat) akan menjadi dukungan dan jika tidak sesuai maka akan menjadi tuntutan lagi begitu seterusnya.

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih

²⁵ Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Halaman: 5

²⁶ Eugene F. Miller. *David Easton's Political Theory*. 1953. University of Georgia. Halaman: 229
http://www.mmsi.org/pr/01_01/miller.pdf diakses pada 11 April 2016

bersifat intelektual. Pakar kebijakan publik, James Anderson menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut.²⁷

- a. *Problem formulation* (formulasi masalah) yaitu mendeteksi masalah saja yang menjadi prioritas kebijakan. Hal-hal apa yang membuat masalah tersebut menjadi kebijakan. Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Pihak-pihak yang terlibat harus jeli dalam tahap penyusunan masalah ini agar memiliki tingkat relevansi yang tinggi dengan masalah kebijakan.
- b. *Formulation* (formulasi kebijakan) yaitu masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai *policy alternatives/policy options* (alternatif atau pilihan kebijakan) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c. *Adaption* (penentuan kebijakan) yaitu dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.
- d. *Implementation* (implementasi) yaitu suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa

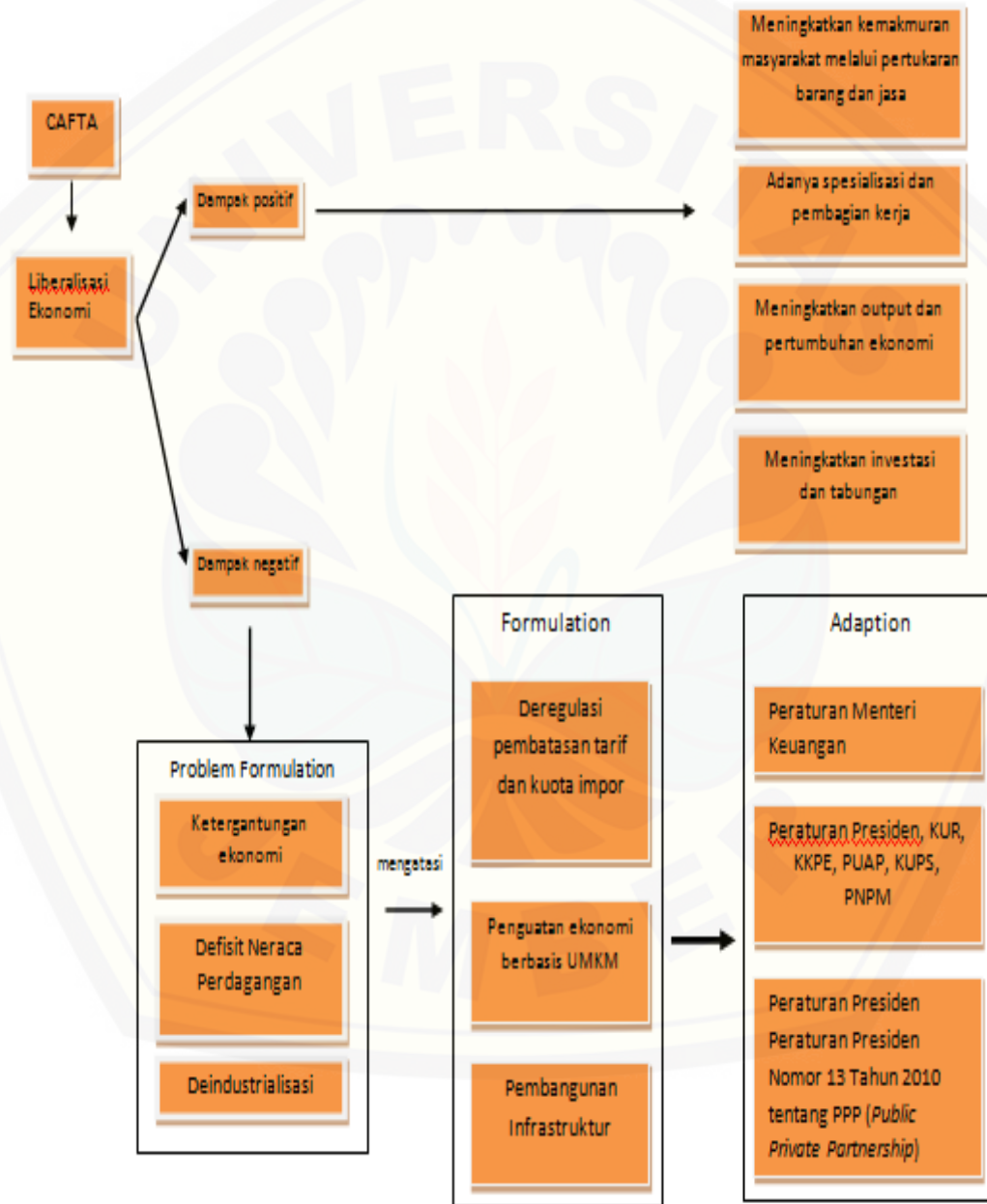
²⁷ James Anderson. 1979. *Public Policy Making*, Holt, Rinehart and Winston. New York: Halaman: 23-24

implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

- e. *Evaluation* (evaluasi) yaitu dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Negara yang belum stabil pertumbuhannya seperti Indonesia proses kebijakan publik sangatlah penting untuk campur tangan pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk melindungi pertumbuhan ekonominya dalam bentuk sebuah kebijakan yang tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat melindungi pasar domestik dari serbuan pasar China.

Berikut bagan analisis pembahasan dari kerangka teori :



Bagan halaman sebelumnya menunjukkan bahwa dampak negatif dari CAFTA sangat mempengaruhi keputusan pengambilan kebijakan dari suatu negara. Ada beberapa respon dari pemerintah untuk membuat suatu kebijakan baru sebagai regulator. Ada 3 formulasi kebijakan yaitu :

1. Deregulasi Pembatasan Tarif dan Kuota Impor.

Perdagangan bebas merupakan konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan atau pembelian barang dan jasa antar negara tanpa adanya hambatan tarif dan nontarif. Karena kondisi setiap negara berbeda maka perlu mengatur kembali kebijakan tarif dan kuota impor dari China sehingga meminimalisir kenaikan impor barang-barang khususnya nonmigas dari China.

2. Penguatan Ekonomi Berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM masih tergolong mempunyai peran rendah dalam perekonomian dalam negeri. Hal ini karena kesulitan dalam akses pendanaan, bahan baku, pemasaran produk lokal, rendahnya akses informasi dan teknologi. Oleh karena itu dengan memberdayakan ekonomi UMKM ini penting agar dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar bebas.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur salah satu faktor penentu dalam pembangunan ekonomi selain modal dan tenaga kerja. Agar distribusi barang dan jasa lancar salah satunya dengan cara membangun infrastruktur baru dan memperbaiki kondisi infrastruktur yang sudah ada.

1.6 Argumen Utama

Liberalisasi ekonomi ini terwujud dalam perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan China (CAFTA) menimbulkan beberapa dampak negatif. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut Pemerintah Indonesia membuat kebijakan baru untuk dapat melindungi pasar dalam negeri dan memaksimalkan keuntungan dari pelaksanaan CAFTA. Dari uraian di atas penulis merumuskan argumen utama untuk menanggulangi dampak negatif CAFTA yaitu deregulasi pembatasan tarif dan kuota impor, penguatan ekonomi berbasis UMKM, dan pembangunan infrastruktur.

1.7 Metode Penelitian

Salah satu syarat dalam penelitian harus ada metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara atau metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam proses mengidentifikasi dan menafsirkan fenomena yang terjadi. Data tersebut dianalisis guna mendapatkan suatu kebenaran. Metode penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu metode pengumpulan data metode menganalisis data.

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan studi kepustakaan guna mendukung data yang kami peroleh dengan berbagai macam literatur untuk menunjang jalannya penulisan. Oleh karena itu, tempat untuk mendapatkan data sekunder yang penulis peroleh berasal dari :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember

Sedangkan sumber literatur penulis peroleh dari :

1. Buku-buku
2. Artikel, Koran, Jurnal Ilmiah
3. Internet

1.7.2 Metode analisis data

Metode kualitatif merupakan gaya penelitian yang berusaha memahami atau menafsirkan fenomena-fenomena yang terjadi dan memahami objek yang diperoleh dari data sekunder.²⁸ Untuk memperoleh hasil yang lebih komperhensif dalam mengolah data tersebut penulis menafsirkan data-data sekunder tersebut sesuai dengan teori yang telah dipelajari dalam menganalisis kebijakan Pemerintah Indonesia. Teori tersebut digunakan untuk mengidentifikasi masalah, menggali, dan menyusun data untuk mendapatkan kesimpulan dalam menafsirkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang menjadi objek penelitian karya ilmiah ini. Dalam analisis data objek penelitian ini dapat berupa pemikiran orang, dokumentasi penelitian, evaluasi dalam bentuk media cetak maupun media elektronik. Hasil dari hasil pengujian fakta terhadap teori atau konsep diperoleh hasil yang merupakan kesimpulan dari pengkajian implementasi kebijakan Indonesia dalam menghadapi dampak negatif CAFTA.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman penelitian ini penulis membagi karya ilmiah ini menjadi 5 sub bab yang saling berkaitan yaitu :

Bab 1 : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, argumen dasar, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 : KESEPAKATAN CHINA ASEAN FREE TRADE AREA (CAFTA)

Bab ini membahas tentang kesepakatan dan peraturan apa saja yang disepakati dalam CAFTA

²⁸ Gumilar Rusliwa Somantri. 2005. *Memahami Metode Kualitatif*
<http://hubsasia.ui.ac.id/index.php/hubsasia/article/viewFile/122/110> diakses pada 17 Maret 2016

Bab 3 : DAMPAK NEGATIF DARI *CHINA-ASEAN FREE TRADE AREA* (CAFTA) TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Bab ini menjelaskan mengenai dampak-dampak negatif CAFTA yang mempengaruhi perekonomian Indonesia

Bab 4 :IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENGATASI DAMPAK NEGATIF *CHINA-ASEAN FREE TRADE AREA* (CAFTA)

Bab ini menjelaskan tentang penerapan kebijakan Pemerintah Indonesia yang dibuat untuk mengurangi dampak negatif CAFTA

Bab 5 : KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari karya ilmiah ini

BAB 2

KESEPAKATAN *CHINA-ASEAN FREE TRADE AREA* (CAFTA)

Seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa CAFTA menimbulkan dampak positif dan negatif. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang menjalin kerjasama CAFTA juga akan mengalami dampak yg sama. Untuk menganalisa dampak negatif CAFTA maka perlu dijelaskan tentang sejarah dan proses terbentuknya CAFTA. Hal ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang proses terjadinya kesepakatan perdagangan bebas CAFTA. Bab ini membahas mengenai perdagangan bebas *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) sebagai awal mula perjanjian atau kesepakatan CAFTA.

ASEAN adalah salah satu organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang cukup strategis secara geopolitik dan geoekonomi. Salah satu agenda utama yang difokuskan oleh ASEAN saat ini ialah menciptakan integrasi ekonomi antar negara di kawasan Asia Tenggara yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2015 yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).²⁹ Salah satu usaha ASEAN untuk mewujudkannya ialah melalui kerjasama perdagangan bebas atau yang biasa dikenal dengan sebutan *free trade* atau perdagangan bebas. Perdagangan bebas itu sendiri merupakan salah satu bentuk kerjasama perdagangan oleh dua negara atau lebih untuk membentuk area perdagangan bebas dimana perdagangan barang atau jasa diantara negara-negara yang mengadakan perjanjian dapat melewati perbatasan negara masing-masing tanpa dikenakan hambatan tarif ataupun non-tarif. ASEAN sendiri mempertegas penerapan perdagangan bebas tersebut dengan salah satunya ialah menciptakan kesepakatan perdagangan bebas kawasan, yaitu *ASEAN Free Trade Area* (AFTA).³⁰

²⁹ Syamsul Arifin, Rizal A. Djaafara, dan Aida S. Budiman. 2008. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Halaman: 9

³⁰ ASEAN Free Trade Area (AFTA Council). 2012. *The ASEAN Free Trade AREA* (AFTA). <http://www.asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/> diakses pada 27 April 2016

AFTA kemudian menjadi salah satu bentuk kerjasama ekonomi perdagangan bebas di kawasan ASEAN yang berisikan program-program komprehensif untuk mereduski tarif regional. AFTA dibentuk pada waktu Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke empat di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif yang akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008) sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global, menarik lebih banyak lagi *Foreign Direct Investment*, meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN (*intra-ASEAN Trade*) sebagai basis produksi dunia. *Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya.

ASEAN melalui penerapan perdagangan bebasnya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada awalnya, penerapan perdagangan bebas yang dilakukan hanya di antara negara kawasan ASEAN saja dan kemudian berkembang menjadi penerapan perdagangan bebas dengan beberapa negara di luar kawasan ASEAN, yaitu kawasan Asia khususnya Asia Timur seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan.

2.1 Proses Kesepakatan *China-ASEAN Free Trade Area* (CAFTA)

Sejak Den Xiou Ping melancarkan reformasi politik ekonominya di akhir tahun 1970an membuat China semakin terbuka dengan dunia luar dan membuka pintu bagi investasi asing. Saat itu, China mulai mendekati ASEAN dengan mengurangi dukungan terhadap gerakan komunis di negara-negara ASEAN.³¹ Salah satunya menutup radio komunis (Suara Demokrasi Malaya). Sebagai keseriusan kerjasama China dengan ASEAN dibuktikan dengan dibubarkannya Partai Komunis

³¹ Bambang Cipto. 2007. *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. Halaman: 170

Malaysia dan Partai Komunis Thailand. Indonesia menanggapi kebijakan China ini dengan membuka kembali forum hubungan diplomatik dengan China pada Agustus 1990 dan diikuti oleh Singapura pada November 1990.

Pada pertemuan *Council of World Affairs* di Indonesia tahun 2003, wakil presiden Hu Jianto menyatakan bahwa konsepsi keamanan China menekankan persamaan, dialog, dan kerjasama untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Untuk itu diperlukan rasa hormat satu sama lain, kerjasama timbal balik, konsensus dan kerjasama dan menghindari pemaksaan kehendak seseorang pada orang lain.³² Bagi ASEAN, China merupakan pasar raksasa bagi produk yang dihasilkan ASEAN. Namun pada saat yang sama China sebagai suatu ancaman ditandai dengan meningkatnya kekuatan militer China dalam lima belas terakhir yang tidak mungkin diimbangi oleh ASEAN. Untuk mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dari booming ekonomi China tanpa harus menyinggung perasaannya maka ASEAN melancarkan politik luar negeri yang mampu menjaga keseimbangan dengan China, Amerika, dan Jepang.³³

Hubungan kerja sama China dengan ASEAN telah dimulai secara informal pada tahun 1991.³⁴ Pada bulan Juli 1996 saat pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ke 29 di Jakarta, China memperoleh status sebagai mitra wicara penuh ASEAN. *China-ASEAN Free Trade Area* (CAFTA) adalah kerjasama regional antara negara-negara ASEAN dengan China. Kerjasama ini dibentuk untuk untuk mewujudkan perdagangan bebas dengan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif maupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, serta meningkatkan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak CAFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Kemudian pada

³² Ibid.

³³ Chien Peng Chung. 2004. *Southeast Asia-China Relation: Dialectics of 'Hedging and Counter Hedging' dalam Southeast Asian Affairs 2004*. Singapura: ISEAS. Halaman: 37

³⁴ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 2005. Jakarta. Halaman: 98

Mekanisme kerjasama China-ASEAN dilakukan melalui beberapa tingkatan yaitu KTT, Pertemuan Menteri Luar Negeri China-ASEAN, - *ASEAN-China Senior Officials' Consultation (ACSOC)*, *ASEAN-China Joint Cooperation Committee (ACJCC)*, dan *ASEAN-China Working Group on Development Cooperation (ACWGDC)*.³⁵

China melalui kerjasama mitra wicara ASEAN melancarkan reformasi politik ekonominya menandatangani *ASEAN – China Comprehensive Economic Cooperation* pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Hal ini diawali dengan proses pembentukan CAFTA para kepala negara kedua pihak menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002. Protokol perubahan *Framework Agreement* yaitu *Join Declaration of The Heads of State/ Government of the Association of the Southeast Asia Nation and People's Republic of China on Strategic Partnership for Peace and Prosperity* ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003 di Bali, Indonesia.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) China-ASEAN tanggal 29 November 2004 di Vientiane Laos, para pemimpin ASEAN dan China mengadopsi *Plan of Action to Implement the Joint Declaration on Strategic Partnership*. Pada saat itu Perdana Menteri China mengusulkan pembentukan China-ASEAN *Eminent Persons Group (EPG)* yang berfungsi sebagai evaluasi hubungan China-ASEAN dan mengeluarkan rekomendasi mengenai arah masa depan CAFTA. Protokol perubahan kedua *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006.

Rencana Aksi Deklarasi Bersama China-ASEAN tentang Kemitraan Strategis bagi Perdamaian dan Kemakmuran (PoA) ditandatangani di Vientiane tahun 2004 akan segera berakhir masa berlakunya pada tahun 2010. Untuk itu, China dan ASEAN saat ini sedang menyusun draft PoA periode 2011-2015. Diharapkan draft PoA yang baru dapat disahkan pada KTT ke-13 di Ha Noi, Vietnam bulan Oktober

³⁵ ibid

2010. China dan ASEAN memiliki 11 prioritas bidang kerja sama yaitu pertanian, energi, informasi dan teknologi komunikasi, sumber daya manusia, investasi bersama, pembangunan Mekong, transportasi, budaya, pariwisata, kesehatan publik dan lingkungan hidup. Pada bidang politik dan keamanan, China merupakan mitra wicara ASEAN pertama yang menandatangani *Treaty of Amity and Co-operation* (TAC) pada KTT ke-7 China-ASEAN di Bali tahun 2003. Beberapa landasan kerja sama ASEAN dan China di bidang politik dan keamanan adalah Deklarasi Bersama China dan ASEAN tentang Kerja sama Bidang Isu-Isu Keamanan Non-Tradisional (*Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the Field of Non-traditional Security Issues 2002*) dan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*.

Sebagai tindak lanjut Deklarasi Bersama China-ASEAN tentang Kerja sama Bidang Isu-Isu Keamanan Non-Tradisional (2002), China-ASEAN menandatangani Nota Kesepahaman Kerja sama Bidang Isu-isu Keamanan Non-Tradisional (MoU) di Bangkok, Thailand tahun 2004 yang berlaku untuk lima tahun. Pada pertemuan *Informal ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) dan *China Consultation* di Brunei Darussalam tahun 2007, sepakat memperpanjang periode MoU selama satu tahun sampai bulan Januari 2010 untuk mempersiapkan revisi MoU tersebut. Pada bulan Agustus 2014, China dan ASEAN memutuskan untuk meningkatkan kerjasama CAFTA.³⁶

Pada pertemuan pertama *AMMTC+China Consultation* dalam rangkaian pertemuan ke-7 AMMTC di Siem Reap, Kamboja tanggal 19 November 2009, ASEAN dan China telah menandatangani *ASEAN-China MoU on Cooperation in the Field of Non-traditional Security Issues* periode 2010 sampai 2014. Pada pertemuan *Post-Ministerial Conference* (PMC) dan China di Phuket, Thailand tanggal 22 Juli 2009, perlunya disepakati untuk melanjutkan pembahasan *draft*

³⁶ ASEAN-China Free Trade Area. 2015. *Building Strong Economic Partnerships*.
<http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20ACFTA.pdf>
diakses pada 27 April 2016

Guidelines for the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) yang sempat terhenti sejak bulan Mei 2006. Kemudian pada bulan April 2010 telah diselenggarakan *ASEAN-China Working Group Meeting on the Implementation of the Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea*. Pertemuan kelompok kerja selanjutnya diselenggarakan di China pada akhir tahun 2010, kedua belah pihak berharap pertemuan *ASEAN-China Senior Officials' Meeting (SOM) on DOC* dapat dilaksanakan sebelumnya.³⁷ Pada pertemuan tersebut, China kembali menyampaikan keinginannya untuk mengaksesi Protokol Traktat Wilayah Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ). China dan ASEAN juga sepakat untuk melakukan kerja sama memberantas peredaran obat-obatan terlarang dalam *ASEAN-China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs (ACCORD)* yang didirikan di Bangkok tahun 2000.

Pada bidang ekonomi, kerja sama ASEAN dan China juga mengalami peningkatan. Volume perdagangan ASEAN dan China meningkat tiga kali lipat dari US\$ 59,6 milyar di tahun 2003 menjadi US\$ 192,5 milyar di tahun 2008. Total perdagangan China-ASEAN mencapai 11,3 % dari total perdagangan ASEAN. Hal ini menempatkan China sebagai mitra dagang ketiga terbesar ASEAN. Pada bulan November 2002, ASEAN dan China menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* untuk mendirikan Wilayah Bebas Perdagangan CAFTA yang mulai berlaku sejak tahun 2010 untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan China (ASEAN 6) dan tahun 2015 untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Viet Nam. Sebagai tindak lanjut KTT ke-12 China-ASEAN di Cha am, Hua Hin, Thailand bulan Oktober 2009, Forum Wilayah Bebas Perdagangan China-ASEAN diselenggarakan di Nanning, China pada tanggal 7 hingga tanggal 8 Januari

³⁷ Ministry of Foreign Affairs of The Kingdom of Thailand. 2014. *Press Releases : Thailand to host the 8th ASEAN-China Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*. <http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/50708-Thailand-to-host-the-8th-ASEAN-China-Senior-Offici.html> diakses pada 27 April 2016

2010. Pada kesempatan tersebut, portal bisnis CAFTA diluncurkan dan mulai beroperasi sejak tanggal 7 Januari 2010.

China secara resmi menyampaikan inisiatif pembentukan dana kerja sama Investasi China-ASEAN dengan dana sebesar US\$ 10 milyar untuk mendanai proyek-proyek kerja sama investasi di bidang infrastruktur, sumber daya alam dan energi. China juga menyampaikan rencananya untuk memberikan pinjaman sejumlah US\$ 15 milyar untuk 3 tahun hingga 5 tahun yang akan datang termasuk di dalamnya pinjaman sebesar US\$ 6,7 milyar. China dan ASEAN menandatangani nota kesepahaman tentang dana kerja sama Investasi China-ASEAN di Nanning, China tanggal 7 Januari 2010. Pada pertemuan Konsultasi Pejabat Senior China-ASEAN di Hue, Viet Nam bulan April 2010. Negara-negara anggota ASEAN menyampaikan harapan agar dana kerja sama Investasi China-ASEAN dapat membiayai pembangunan infrastruktur konektivitas darat, udara, maritim, dan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Konektivitas ASEAN.

Pada KTT ke-12 China-ASEAN, telah menandatangani tiga MoU yaitu Nota Kesepahaman Pembentukan Pusat China-ASEAN oleh para Menteri Luar Negeri China dan ASEAN, serta Nota Kesepahaman Kerja sama di Bidang Hak Kekayaan Intelektual dan *MoU between ASEAN and China on Strengthening Cooperation in the Field of Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment* oleh para Menteri Ekonomi China dan ASEAN. Ketiga MoU ini diharapkan akan dapat meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi China dan ASEAN dan juga hubungan antar masyarakat. Sebagai tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepahaman Pembentukan Pusat China-ASEAN, Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) telah ditunjuk sebagai lembaga pemrakarsa. Pada KTT ke-13 ASEAN-China di Ha Noi, Viet Nam bulan Oktober 2010 yang akan datang China dan ASEAN sepakat untuk meluncurkan Pusat Virtual China-ASEAN sebagai tahap pertama pendirian Pusat China-ASEAN di Beijing, China pada tahun 2011.

Terkait dengan sebelas prioritas kerja sama China-ASEAN, kedua belah pihak telah menandatangani sejumlah MoU antara lain: Nota Kesepahaman Kerja sama Transportasi, Nota Kesepahaman Kerja sama Kebudayaan, Nota Kesepahaman Kerja sama Sanitasi dan Phytosanitari, Nota Kesepahaman Kerja sama Pertanian dan Nota Kesepahaman Kerja sama Informasi dan Media. China dan ASEAN juga telah menandatangani Deklarasi Beijing Menteri-Menteri Pemuda China dan ASEAN tentang Kerja sama Pemuda China-ASEAN yang menjadi cetak biru untuk memperkuat kerja sama di bidang pemuda. Berbagai kegiatan di bidang budaya, kesehatan publik, lingkungan hidup, pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, pemuda dan media telah dilakukan, antara lain Forum Industri Kebudayaan China-ASEAN, Workshop China-ASEAN mengenai Praktek Obat-obatan Tradisional Standar, Workshoptentang Manfaat Obat-obatan Tradisional China dan Pengembangan Obatobatan Tradisional di ASEAN, Konperensi para Rektor ASEAN, Pekan Kerja sama Pendidikan China-ASEAN, Workshop Musim Panas Siswa Sekolah Atas China-ASEAN, Perkemahan Pemuda ASEAN-China, Forum Wirausaha Muda China-ASEAN, Program Pertukaran Wirausahawan Muda China-ASEAN, Program Pertukaran Pegawai Negeri Muda China-ASEAN, dan Seminar Kerja sama Media China-ASEAN.

Pada KTT ke-12 China-ASEAN antara lain menyepakati pentingnya peningkatan kerja sama di bidang obat-obatan tradisional sebagai suatu alternatif dalam kesehatan publik, pelatihan 100 orang pejabat di bidang lingkungan hidup dari Negara-negara Anggota ASEAN, dan peluncuran program *Double 100,000 Goal of Students Mobility in 2020*. Pada tanggal 31 Desember 2008, China telah menunjuk H.E. Mrs. Xue Hanqin sebagai Duta Besar China untuk ASEAN. Saat ini China tengah dalam proses membuka Kantor China untuk ASEAN yang melekat dengan Perwakilan (Kedutaan Besar RRC) bilateralnya di Jakarta.

Beberapa tujuan dari CAFTA antara lain :

- Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota.
- Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi.
- Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota.
- Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN-4 (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam –CLMV) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota.³⁸

2.2 Proses Preferential Tariff Perdagangan CAFTA

Kesepakatan CAFTA akan dilaksanakan liberalisasi penuh pada tahun 2010 bagi ASEAN 6 dan China, serta tahun 2015 untuk Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Penurunan Tarif dalam kerangka kerjasama ACFTA dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:³⁹

³⁸ Kementerian Perdagangan. 2010. *ASEAN-China Free Trade Area*. Sigit Setiawan. 2012. *ASEAN-China FTA:Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia Dan China*.

http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_01.%20ASEAN-CHINA%20FTA%20Dampak%20Ekspor.pdf diakses pada 27 April 2016

³⁹ Sigit Setiawan. 2012. *ASEAN-China FTA:Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia Dan China*.

http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_01.%20ASEAN-CHINA%20FTA%20Dampak%20Ekspor.pdf diakses pada 27 April 2016

2.2.1. *Early Harvest Package* (EHP)

Tabel 1. Produk-produk dalam EHP antara lain:

Tingkat tarif bea masuk (=X)	Jangka Waktu tidak melewati:		
	1 Jan 2004	1 Jan 2005	1 Jan 2006
$X \geq 15\%$	10%	5%	0%
$5\% \leq X < 15\%$	5%	0%	0%
$X < 5\%$	0%	0%	0%

Sumber : Sigit Setiawan. 2012. *ASEAN-China FTA:Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia Dan China*. http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_01.%20ASEAN-CHINA%20FTA%20Dampak%20Ekspor.pdf diakses pada 27 April 2016

Chapter 01 s.d 08 : Binatang hidup, ikan, dairy products, tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan (SK Menkeu No 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam kerangka EHP CAFTA). Kesepakatan Bilateral (Produk Spesifik) antara lain kopi, minyak kelapa/CPO, Coklat, Barang dari karet, dan perabotan (SK Menkeu No 356/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam Kerangka EHP Bilateral Indonesia-China FTA). Penurunan tarif dimulai 1 Januari 2004 secara bertahap dan menjadi 0% pada 1 Januari 2006.

2.2.2. *Normal Track*Tabel 2. *Threshold* :

Tingkat tarif bea masuk (=X)	Jangka Waktu tidak melewati 1 Januari :							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
$X > 20\%$	20	20	12	12	5	0/5*	0/5*	0/0*
$15\% \leq X < 20\%$	15	15	8	8	5	0/5*	0/5*	0/0*
$10\% \leq X < 15\%$	10	10	8	8	5	0/0	0/0	0/0*
$5\% < X < 10\%$	5	5	5	5	0	0	0	0/0*
$X \leq 5\%$	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	0	0	0	0/0*

Sumber : Sigit Setiawan. 2012. *ASEAN-China FTA:Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia Dan China*. http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_01.%20ASEAN-CHINA%20FTA%20Dampak%20Ekspor.pdf diakses pada 27 April 2016

Dari 40% menjadi 0-5% pada 2005. Dari 100% menjadi 0% pada 2010 (tarif pada beberapa produk, tidak lebih dari 150 pos tarif akan dieliminasi pada tahun 2012). Jumlah NT II Indonesia adalah sebesar 263 pos tarif (6 digit) Legal enactment NT untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah ditetapkan melalui SK. MEN-KEU No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTA.

2.2.3. *Sensitive Track*

- *Sensitive List(SL)* :

Tahun 2012 tarif pengurangan produk SL sebesar 20%. Pengurangan menjadi 0-5% pada tahun 2018. Produk sebesar 304 Produk (HS 6 digit) antara lain Barang Jadi Kulit : tas, dompet; Alas kaki : Sepatu sport, Casual, Kulit; Kacamata; Alat Musik; Tiup, petik, gesek; Mainan: Boneka; Alat Olah Raga; Alat Tulis; Besi dan Baja; Spare part; Alat angkut; Glokasida dan Alkaloid Nabati; Senyawa Organik; Antibiotik; Kaca; Barang-barang Plastik

- *Highly Sensitive List (HSL)*

Tahun 2015 tarif pengurangan produk HSL sebesar 50%. Produk HSL adalah sebesar 47 Produk (HS 6 digit), yang antara lain terdiri dari Produk Pertanian, seperti Beras, Gula, Jagung dan Kedelai; Produk Industri Tekstil dan produk Tekstil (ITPT); Produk Otomotif; Produk Ceramic Tableware.

2.3 **Pertumbuhan Ekspor dan Impor China serta Negara Anggota ASEAN**

Pada Tabel. 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 dan 2012, Malaysia mempunyai nilai perdagangan tertinggi dengan China, sedangkan Indonesia tertinggi keempat setelah Thailand dan Singapura. Pada tahun 2011 nilai perdagangan Indonesia menunjukkan surplus yang ditandai dengan lebih tingginya nilai ekspor

dibandingkan impor, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan sehingga Indonesia mengalami defisit perdagangan.⁴⁰

Tabel 3. Nilai ekspor dan impor antara negara ASEAN dengan China Tahun 2011 hingga tahun 2012

Negara ASEAN	2011 (juta US\$)		2012 (juta US\$)	
	Impor dari Cina	Ekspor ke Cina	Impor dari Cina	Ekspor ke Cina
Brunei	0,7	0,6	1,3	0,4
Kamboja	2,3	0,2	2,7	0,2
Indonesia	29,2	31,3	34,3	32
Laos	0,5	0,8	0,9	0,8
Malaysia	27,9	62,1	36,5	58,3
Myanmar	4,8	1,7	5,7	1,3
Philiphina	14,3	18,0	16,7	19,6
Singapura	35,6	28,1	40,7	28,5
Thailand	25,7	39,0	31,2	38,6
Vietnam	29,1	11,1	34,2	16,2

Sumber : Puspitasari, Sulusi Prabawati. 2014. *Peluang Memperkuat Daya Saing Hortikultura Dalam Kerangka ASEAN - China Free Trade Agreement (ACFTA)*.
http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/memperkuat_dayasaing_produk_pe/BAB-IV-2.pdf diakses pada 27 April 2016

Sumbangan ekspor Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga masih kecil dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Khusus untuk ekspor produk barang saja, Indonesia masih kalah jauh dengan Malaysia dan Thailand, apalagi jika dibandingkan dengan Singapura. Berdasarkan data *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), Indonesia hanya berada pada urutan keempat dalam daftar negara eksportir barang terbesar di ASEAN. Total ekspor barang pada 2014 Indonesia mencapai 176,3 miliar dolar AS atau 13,6 persen dari total nilai ekspor barang 10 negara ASEAN.

⁴⁰ Puspitasari, Sulusi Prabawati. 2014. *Peluang Memperkuat Daya Saing Hortikultura Dalam Kerangka ASEAN - China Free Trade Agreement (ACFTA)*.
http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/memperkuat_dayasaing_produk_pe/BAB-IV-2.pdf diakses pada 27 April 2016

Singapura menempati pemuncak daftar top eksportir dengan nilai sebesar 409,8 miliar dolar AS atau 31,6 persen dari total nilai ekspor negara-negara ASEAN. Thailand dan Malaysia berada pada posisi kedua dan ketiga dengan nilai ekspor masing-masing sebesar 234,1 miliar dolar AS (18,1 persen) dan 227,6 miliar dolar AS (13,6 persen).

Vietnam perlu diwaspadai karena selama beberapa tahun terakhir mampu mencatat nilai ekspor mendekati Indonesia. Pada 2014 saja, nilai ekspor Vietnam sudah mencapai 150,5 miliar dolar AS atau 11,6 persen dari total nilai ekspor 10 negara ASEAN. Dengan nilai ekspor barang sebesar itu, Vietnam mampu berada pada urutan kelima. Dari lima negara utama ASEAN, yaitu Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina, pertumbuhan nilai ekspor barang tertinggi diraih Thailand dalam 10 tahun terakhir. Kenaikan nilai ekspor barang Thailand pada 2014 mencapai 105,1 persen dari 110,9 miliar dolar AS pada 2005. Pertumbuhan nilai ekspor barang Indonesia pada 2014 hanya 102,6 persen dari 2005 sebesar 87,0 miliar dolar AS. Vietnam tidak sekedar ancaman, tetapi sudah menggeser posisi Filipina. Sejak 2008, nilai ekspor barang dari Vietnam sudah melebihi Filipina. Dalam ASEAN-6 yang memasukkan Vietnam, posisi negara yang menerapkan sistem Republik Sosialis ini justru menempati urutan tertinggi, dengan pertumbuhan nilai ekspor barang mencapai 363,8 persen di 2014.

Filipina menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan dari sisi ekspor barang. Nilai ekspor Filipina cenderung berfluktuasi. Pada 2014 saja, nilainya hanya 62,1 miliar dolar AS atau mengambil porsi sebesar 4,8 persen dari total nilai ekspor barang ASEAN. Bandingkan saja dengan Vietnam yang sudah berkontribusi hingga 11,6 persen artinya nilai ekspor barang Vietnam nyaris 2,5 kali lebih besar dari Filipina.⁴¹

⁴¹ Koran Republika. 2015. *Menundukkan Sang Naga*.
<http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/09/21/nv0rok23-menundukkan-sang-naga> diakses pada 2 Mei 2016

Sesuai penjelasan dalam bab ini bahwa kesepakatan CAFTA merupakan perjanjian perdagangan antar negara China dan ASEAN yang tidak bisa di tolak karena akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dengan adanya perdagangan bebas China-ASEAN akan membuka kesempatan bertukarnya arus barang dan jasa antar negara.



BAB 3

DAMPAK NEGATIF *CHINA-ASEAN FREE TRADE AREA* (CAFTA) TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Pada bab sebelumnya membahas mengenai proses perjanjian atau kesepakatan perdagangan bebas yaitu *China-ASEAN Free Trade Area* (CAFTA). Kesepakatan ini membuka peluang bagi negara-negara anggota untuk bertukar barang dan jasa secara bebas melalui beberapa tahap. Tentu dalam perdagangan bebas mempunyai dampak positif dan dampak negatif seperti sebuah sisi mata uang untuk pertumbuhan negara yang bersangkutan. Dalam bab ini menjelaskan beberapa dampak yang dialami oleh Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang melaksanakan CAFTA.

3.1 Dampak Positif CAFTA

Liberalisasi perdagangan CAFTA ini tentu mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah ketika liberalisasi perdagangan melahirkan *trade creation*, dimana terjadi peralihan konsumsi dari produk domestik yang bersifat *high-cost* ke produk impor yang bersifat *low-cost* (yang dihasilkan oleh negara partner). Dampak positif dari liberalisasi perdagangan menurut David Ricardo yaitu menyatakan bahwa dalam keadaan *free trade*, apabila salah satu negara kurang efisien dibandingkan negara lainnya dalam memproduksi kedua barang tersebut maka kedua negara masih dimungkinkan melakukan perdagangan dan menguntungkan kedua belah pihak yaitu.⁴² Menurut Boediono bahwa manfaat dari liberalisasi perdagangan adalah :

- 1) Akses pasar yang lebih luas sehingga memungkinkan diperoleh inefisiensi karena liberalisasi perdagangan cenderung menciptakan pusat-pusat produksi baru yang

⁴² Flora Susan Nongsina. 2007. *Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekspor-Impor Indonesia*. Depok. Halaman: 4
<http://mukhyi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9106/PENGARUH+KEBIJAKAN+LIBERALISASI+PERDAGANGAN+TERHADAP+LAJU+PERTUMBUHAN+EKSPOR-IMPOR+INDONESIA.pdf> diakses pada 27 April 2016

menjadi lokasi berbagai kegiatan industri yang saling terkait dan saling menunjang sehingga biaya produksi dapat diturunkan.

- 2) Iklim usaha menjadi kompetitif sehingga mengurangi kegiatan yang bersifat *rent seeking* dan mendorong pengusaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi bukan bagaimana menghapakan fasilitas dari pemerintah.
- 3) Arus perdagangan dan investasi yang lebih bebas mempermudah proses alih teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
- 4) Perdagangan yang lebih bebas memberikan signal harga yang lebih benar sehingga meningkatkan efisiensi investasi.
- 5) Perdagangan yang lebih bebas kesejahteraan konsumen meningkat karena terbuka pilihan-pilihan baru. Namun untuk berjalan dengan lancar, suatu pasar yang kompetitif perlu dukungan perundang-undangan yang mengatur persaingan yang sehat dan melarang praktek monopoli.⁴³

Dari penjelasan dampak positif di atas liberalisasi perdagangan diharapkan mampu meningkatkan volume perdagangan ekspor impor antar negara, meningkatkan daya saing dan kreativitas pelaku pasar, mendapatkan barang murah dan berkualitas bagi konsumen, persaingan bisnis yang sehat, investasi dari pihak luar dan meminimalisir campur tangan pemerintah untuk keberlangsungan kegiatan ekonomi.

3.2 Dampak Negatif CAFTA

Tanda dampak negatif dari liberalisasi perdagangan adalah apabila yang terjadi adalah *trade diversion*, yaitu peralihan konsumsi dari produk impor yang bersifat *low-cost* (yang dihasilkan oleh negara non anggota) ke produk impor yang bersifat *high-cost* (yang dihasilkan oleh negara partner kerjasama dalam FTA). Beberapa dampaknya yaitu :

⁴³ Boediono. 2001. *Indonesia Menghadapi Ekonomi Global*. Jogjakarta: BPFE.
http://eprints.undip.ac.id/27666/1/Skripsi_Prabowo_Siswanto_C2B607045%28r%29.pdf diakses pada 17 Mei 2016

4.3.1. Ketergantungan ekonomi

CAFTA secara positif dipandang sebagai sebuah jalan untuk negara-negara anggota memperluas pasar luar negerinya melalui kerjasama dengan China. Menurut teori ketergantungan Dos Santos yaitu jika ekonomi negara-negara pusat bergerak maju atau mundur bisa jadi ekonomi negara-negara pinggiran juga ikut maju atau mundur karena ekonomi negara-negara pinggiran tergantung negara-negara pusat. Namun demikian jika negara-negara pinggiran mengalami kesulitan bukan berarti ekonomi negara-negara pusat terkena dampaknya karena tidak tergantung ekonomi negara-negara pinggiran. Hal ini yang dinamakan “saling ketergantungan” tetapi tidak setara. Contohnya China sebagai negara pusat pada tahun 2015 mengalami krisis ekonomi khususnya pasar saham, sebagai negara pinggiran salah satunya Indonesia terkena dampaknya karena mengandalkan ekspor ke China. Naiknya pasar saham China pada awal tahun 2015 disebabkan karena banyaknya investor membeli saham dengan utang. Ketika saham pertama mulai jatuh bulan lalu, banyak investor menjual saham mereka dengan cepat untuk membayar utang. Hal ini menjadi pemicu merosot tajamnya pasar saham China.

Menurut pakar ekonom dari Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih laju pertumbuhan ekonomi nasional kembali melambat. Pada kuartal I tahun ini, pertumbuhan hanya 4,71 persen, terendah dalam enam tahun terakhir.⁴⁴ Lampu merah sudah menyala, bisa masuk masa resesi karena sudah tiga kuartal berturut-turut menurun terus. China merupakan konsumen minyak terbesar kedua dan konsumen batu bara terbesar di dunia.⁴⁵ Oleh karena itu, Indonesia banyak mengekspor bahan mentah minyak dan batu bara ke China mengalami penurunan penjualan. Sedangkan pada saat Indonesia mengalami krisis keuangan pada tahun 2013 karena mata uang

⁴⁴ Sasa. 2015. *Ambruknya Ekonomi Cina dan Dampaknya Terhadap Krisis Ekonomi Indonesia*. <http://www.voa-islam.com/read/politik-indonesia/2015/10/20/39970/ambruknya-ekonomi-cina-dan-dampaknya-terhadap-krisis-indonesia/#sthash.aMlcsDgG.dpbs> diakses pada 2 Mei 2016

⁴⁵ IW.AS. 2014. *Mewaspada! Perlambatan Ekonomi China*. http://www.himiespa.feb.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Kajian-Denda_Feb.pdf diakses pada 2 Mei 2016

dollar naik dan mata uang rupiah semakin melemah.⁴⁶ Perekonomian China tidak terpengaruh dengan krisis ekonomi di Indonesia karena mata uang yang dipakai transaksi perdagangan adalah dolar AS bukan Yuan. Ketika nilai tukar sebuah mata uang melemah, maka yang biasanya mencolok terkena dampaknya adalah harga komoditi impor, baik yang menjadi obyek konsumsi maupun alat produksi (bahan baku dan barang modal). Karena harga komoditi impor dipatok dengan mata uang negara asal, maka jika nilai mata uang negara tujuan jatuh, harga komoditi impor akan naik.

4.3.2. Defisit Neraca Perdagangan

Secara umum terlihat bahwa dengan adanya CAFTA ini, kerjasama antar negara anggota dengan China akan memberikan keuntungan tersendiri bagi masing-masing negara. Sementara secara negatif, disepakatinya CAFTA akan membawa dampak yang mengancam pasar dalam negeri di masing-masing negara. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi dan kesiapan dari pasar lokal dalam bersaing dengan produk-produk China. Sebagai negara anggota, Indonesia juga turut mengimplementasikan CAFTA sebagai salah satu kebijakan perdagangan luar negerinya. Namun demikian selama diberlakukannya CAFTA semenjak tahun 2002 oleh ASEAN, neraca perdagangan Indonesia dengan China menunjukkan indikasi neraca perdagangan yang defisit dalam kegiatan ekspor-impor barang untuk Indonesia. Seperti yang ada pada grafik 1 di bawah ini.⁴⁷

⁴⁶ Mohamad Zaki Husein. 2013. *Krisis Mata Uang Rupiah 2013: Penyebab dan Dampaknya*. <http://indoprogres.com/2013/09/krisis-mata-uang-rupiah-2013-penyebab-dan-dampaknya/> diakses pada 26 Maret 2016

⁴⁷ ibid

Grafik 1 adalah nilai perdagangan Indonesia dengan China sejak tahun 2003 sebelum penurunan tarif pertama sampai tarif BM 0% di tahun 2013.



Sumber : M. Iqbal Fauzan, Rahmat Romansah, Risma Safutri, dan Rissa Ladya. 2013. *Neraca Perdagangan Indonesia Defisit*. http://www.kompasiana.com/rissasha/neraca-perdagangan-indonesia-defisit_552b85f56ea8346b058b456b diakses pada 5 April 2016

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2003 hingga 2011 neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus ekspor dari pada impor. Tetapi mengalami penurunan surplus yang cukup tajam pada tahun 2008 karena laju ekspor meningkat dengan dibarengi laju impor. Selanjutnya neraca perdagangan Indonesia mulai mengalami penguatan kembali pada tahun 2009 hingga 2011, namun pada tahun 2012 mengalami defisit sebesar 1.6 Miliar USD. Hal ini disebabkan karena melemahnya kegiatan ekspor pada tahun tersebut. Namun demikian penyebab yang lebih dominan mempengaruhi neraca perdagangan tahun 2012 adalah meningkatnya kegiatan impor.

Berdasarkan tabel neraca perdagangan ekspor-impor Indonesia-China, terlihat bahwa Indonesia cenderung lebih banyak mengimpor barang dari China dibandingkan dengan mengekspor barang ke China. Hal ini secara tidak langsung juga menandakan bahwa China lebih banyak mengekspor barang dibandingkan dengan mengimpor barang dari Indonesia. Kondisi tersebut tentunya merupakan keuntungan bagi China. Indonesia hanya mengalami surplus perdagangan

dengan China pada tahun 2003 sebesar 535 juta dollar AS, tepatnya 1 tahun setelah pelaksanaan CAFTA.

Sejak 2004 hingga November 2009, Indonesia secara konsisten mengalami defisit perdagangan dengan China dan mencapai defisit terbesar pada 2008 yakni sebesar USD -7,2 miliar atau setara dengan Rp 70 triliun. Kondisi tersebut menandakan, Cina mendapatkan keuntungan hampir 3 kali lipat sejak diberlakukannya CAFTA. Sementara di tahun 2010, yang mana kesepakatan CAFTA mulai secara aktif diberlakukan BM 0 % di Indonesia juga terjadi kondisi yang sama. Pada tahun 2010 neraca perdagangan Indonesia–China masih menunjukkan surplus bagi Cina. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Duta Besar Republik Indonesia untuk China, Imron Cotan yang mengatakan bahwa setelah diterapkannya CAFTA di Indonesia, neraca perdagangan Indonesia tetap mengalami defisit. Hingga akhir 2010, tercatat neraca perdagangan Indonesia-China berada dalam posisi 49,2 miliar dollar AS dan 52 miliar dollar AS. Artinya, barang Indonesia yang diekspor ke China nilainya 49,2 miliar dollar AS, sedangkan barang China yang diekspor ke Indonesia nilainya 52 miliar dollar AS. Hal ini menandakan bahwa neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sekitar 2,8 miliar dollar AS.⁴⁸

Defisit neraca perdagangan ini disebabkan oleh sektor migas pada tahun 2012 sebesar 5,5 milyar USD sedangkan sektor non migas menyumbang surplus sebesar 3,9 milyar USD. Akibatnya pada tahun 2012 mengalami defisit untuk pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir sebesar 1,6 milyar USD. Neraca perdagangan pada tahun 2013 tidak jauh berbeda dengan tahun 2012, pada tahun 2013 (data sementara yang ditunjukkan bulan Januari hingga Juni) masih mengalami defisit, penyebabnya sama seperti tahun 2012, tingginya impor migas menyumbang defisit pada neraca perdagangan. Impor migas terbesar adalah impor BBM (Bahan Bakar Minyak).

⁴⁸ Arisa Permata Siwi. 2013. *Bilateral Free Trade : Hubungan Perdagangan Indonesia-China dalam Kerangka ACFTA*. Halaman: 4 <http://journal.unair.ac.id/bilateral-free-trade-article-5715-media-131-category-8.html> diakses pada tanggal 10 April 2016

Menurut Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, defisit neraca perdagangan migas selama 2012 dipicu oleh tingginya permintaan impor BBM yang mencapai 28,7 miliar USD atau naik 1,9 persen. Hal tersebut menyebabkan neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2012 mengalami defisit sebesar 1,6 Miliar USD. Karena tingginya permintaan akan BBM dalam negeri tidak diimbangi dengan persediaan BBM dalam negeri sehingga menyebabkan Indonesia harus impor BBM untuk memenuhi permintaan tersebut. Keadaan ini diperparah dengan konsumsi BBM yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan defisitnya neraca perdagangan pada tahun 2012 dan tahun 2013 menunjukkan bahwa Indonesia belum siap untuk menghadapi pasar persaingan bebas ASEAN. Ketidaksiapan ini dapat kita lihat dari rendahnya kualitas produk yang dihasilkan oleh Indonesia. Pada akhirnya produk tersebut belum mampu bersaing dengan produk dari luar. Selain itu, kondisi industri manufaktur di Indonesia belum mendukung secara kualitas atau belum memenuhi persyaratan perdagangan bebas karena kurang kesiapan infrastruktur, produktivitas yang rendah, bunga kredit yang tinggi, biaya transportasi yang tinggi,

Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia adalah faktor utamanya belum mampu memenuhi kebutuhan barang modal, sehingga untuk memenuhinya Indonesia harus impor barang modal dari luar. Defisit yang terjadi pada kuartal II tahun 2013 dampaknya telah kita rasakan, yaitu berkurangnya cadangan devisa dan berimbas langsung pada perekonomian nasional secara keseluruhan, terutama menyangkut inflasi, dan suku bunga serta menguatnya nilai tukar dolar di pasar uang membuat apresiasi rupiah kembali terhambat dan mengalami pelemahan di transaksi pasar uang kemarin.

4.3.3. Deindustrialisasi

Deindustrialisasi merupakan sebuah proses dinamis yang terkait dengan tren menurunnya kinerja manufaktur dan tingkat penyerapan tenaga kerja di industri dalam kurun waktu tertentu. Hal ini ditandai dengan penurunan kontribusi sektor

manufaktur alias industri pengolahan nonmigas terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB). Menurut Joseph E. Stiglitz negara-negara yang membuka lebar dirinya dalam perdagangan bebas, melakukan deregulasi pasar uang, secara tiba-tiba memprivatisasi berbagai perusahaan milik negara dalam kenyataannya justru mengalami kemunduran sosial dan ekonomi. Negara mendapat serbuan investasi namun ketika sentimen pasar investasi berubah karena adanya perubahan sosial dan politik tertentu maka uang yang masuk akan segera ditarik keluar dan mengakibatkan kehancuran ekonomi salah satunya pengangguran meningkat.

Indonesia secara komparatif memiliki banyak keunggulan. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar menjadi potensi pasar yang luar biasa dan kekayaan hasil alam seperti migas, agribisnis, agroindustri, dan bahan baku setengah jadi yang sulit disaingi negara-negara lain baik di level ASEAN maupun dunia. Sektor ekonomi seperti industri makanan minuman, otomotif, besi baja dan logam masih mendongkrak pertumbuhan industri hingga tahun 2011. Sektor tersebut tidak terlalu terpengaruh oleh perlambatan ekonomi yang terjadi selama periode tahun 2009 hingga tahun 2011, akibat krisis ekonomi yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat (AS). Namun demikian, pada tahun 2012 pertumbuhan industri tersebut menurun akibat dari laju impor yang tidak terkendali.

Jika ditelisik lebih rinci, ada banyak produk dalam negeri yang punya kemampuan bersaing secara internasional yang perlu Pemerintah Indonesia dukung. Knalpot mobil mewah Mercedes Benz, ternyata buatan Purbalingga, Jawa Tengah.⁴⁹ Kemudian Polytron, Maspion, dan aneka produk hasil industri kreatif yang beberapa tahun terakhir ini patut diperhitungkan eksistensinya di level internasional. Varian dari industri kreatif ini misalnya kesenian, kerajinan tangan (*handycraft*), fashion, musik, dan produk hasil kreativitas lainnya yang memiliki

⁴⁹ Antara. 2009. *Knalpot Mercedes Bens Ternyata Diproduksi Di Purbalingga*. <https://otomotif.tempo.co/read/news/2009/04/23/123172155/knalpot-mercedes-ternyata-diproduksi-di-purbalingga> diakses pada 20 Mei 2016

keunikan dan ciri khas budaya Indonesia.⁵⁰ Produk seperti ini jika diekspor akan memiliki nilai tambah yang besar bagi perekonomian.

Ada sekitar 20 perusahaan produk lokal yang memiliki keunggulan bersaing dengan perusahaan dunia. Berdasarkan hasil Survei majalah Warta Ekonomi tentang “perusahaan idaman 2010”. Beberapa dari mereka adalah Pertamina, Astra International, Telkom, Bank Central Asia, Uniliver Indonesia, Garuda Indonesia, Indosat, Bank Mandiri, PT. Bakrie & Brothers, Telkomsel, Kalbe Farma, PT. Indofood Sukses Makmur, PT. Yamaha Indonesia Motor, PT. IBM Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan PT. Adira Dinamika. Beberapa nama perusahaan tersebut juga berhasil membukukan nilai kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2011.⁵¹ Namun selama ini Indonesia lebih dominan mengeskpor hasil produk bahan mentah seperti batu bara, kelapa sawit (CPO), dan hasil pertanian, yang nilai tambahnya kecil dan bersifat eksploitatif. Setelah barang mentah diekspor ke negara lain kemudian diimpor kembali oleh Indonesia sebagai barang jadi. Hal ini yang membuat pertumbuhan laju ekspor Indonesia lebih rendah daripada laju impor.

Penyebab utama lemahnya daya saing negara kita daripada China dalam survei *World Economic Forum* (WEF) tersebut yaitu suku bunga perbankan yang sangat tinggi dan kondisi infrastruktur yang buruk. Menurut ekonomi WEF, Thierry Geiger, bahwa sektor infrastruktur menyumbang dampak paling besar. Kondisi pelabuhan, jalan raya, dan rel kereta api dinilai sangat memprihatinkan. Apalagi jalan tol, pasokan listrik, ketenagakerjaan, dan fasilitas teknologi informasi yang serba terbatas. Karena keterbatasan akses, infrastruktur yang buruk (bahkan nihil di beberapa daerah), yang mengakibatkan tingginya biaya produksi dan logistik. Sebagai contoh harga semen di Nabire, Papua Barat,

⁵⁰ R. Ghita Intan Permatasari. 2011. *Kerajinan Tangan & Fesyen Penggerak Roda Ekspor*. <http://economy.okezone.com/read/2011/11/24/320/533784/kerajinan-tangan-fesyen-penggerak-roda-ekspor> diakses pada 20 Mei 2016

⁵¹ Rian Hilmawan dan Syaiful Anwar. 2012. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Telaah Kontemporer*. Tarakan: LPFE Universitas Borneo Tarakan. Halaman: 14

misalnya bisa mencapai Rp 1 juta/sak. Bahkan harga bensin di sana, konon mencapai Rp 50 ribu/liter. Tentang produk impor kita juga cukup mahal. Waktu yang dibutuhkan kapal masuk ke pelabuhan itu 81,9 jam, jadi sekitar 3,5 hari. Waktu efektif untuk menaikkan dan menurunkan barang 36 jam, sekitar 1,5 hari. Totalnya sekitar 5 hari. Bayangkan jika barangnya adalah non-durable goods, alias barang yang tidak tahan lama, seperti buah, sayur, udang. Akibatnya produk kita menjadi tidak layak jual. Secara logika siapa yang berkenan melakukan impor dengan resiko demikian. Akibatnya perdagangan menjadi sangat tidak efisien. Hal ini mengakibatkan perusahaan merugi karena produk tidak bisa terjual ditambah lagi pengangguran meningkat.

Kondisi yang seperti itu membuat industri dalam negeri mendapat serbuan produk China yang merajalela pasar Indonesia sebesar 47 % menurut Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan. Pada tahun 2010 pasar tanang abang yang merupakan pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara banyak yang menjual produk China mulai dari baju anak-anak, remaja, dewasa, batik China, garmen, tas, dan produk manufaktur lainnya.⁵² Harga yang lebih murah serta kualitas yang hampir sama dengan produk industri manufaktur Indonesia membuat konsumen lebih memilih membeli produk China. Hal ini membuat para pengusaha industri dalam negeri banting setir menjadi pedagang impor karena lebih menguntungkan daripada membuat produk sendiri.

Selain itu, pada tahun 2015 perusahaan di bidang pertambangan dan perkebunan paling parah terkena dampaknya. Sebanyak kurang-lebih 125 perusahaan pertambangan batu bara di Kalimantan Timur tidak beroperasi. Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) hal ini terkait lesunya perekonomian dunia, turunnya harga minyak mentah, minimnya permintaan akan komoditas batu bara yang diikuti penurunan harga. Selain itu, disebabkan oleh banyaknya pungutan liar yang

⁵² Edj. 2010. *Produk China Sulit dicegah*.

<http://nasional.kompas.com/read/2010/01/14/08475188/produk.china.sulit.dicegah> diakses pada tanggal 2 Juli 2016

dilakukan pemerintah terhadap pengusaha tersebut. Ketua Bidang Tambang Apindo Pusat Muliawan Margadana, membenarkan tingginya beban yang ditanggung pengusaha yaitu pungutan resmi yang dibayarkan itu lebih dari 11 persen. Apalagi pungutan-pungutan itu di luar peraturan resmi. Akibatnya, 5.000 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).⁵³

Permasalahan ditambah dengan upah minimum tenaga kerja Indonesia masih terbilang rendah dibanding negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Studi kasus keluarnya perusahaan Toshiba dari Indonesia yang bangkrut. Murahnyanya upah buruh ini berdampak pada kurangnya konsumsi ekonomi oleh masyarakat. Hal ini berakibat turunnya produksi karena produk tidak terjual sesuai harapan. Lalu perusahaan mengalami kebangkrutan dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masal. Investor asing juga akan berpikir panjang untuk menanamkan modal.⁵⁴

Dari beberapa dampak negatif di atas menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antar negara. Adanya pasar bebas ini memang akan memicu pertumbuhan ekspor impor suatu negara. Namun demikian, jika pertumbuhan dalam suatu negara lebih tinggi daripada ekspor maka negara itu akan mengalami defisit. Dampak dari neraca perdagangan defisit akibat dari produsen dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produsen dari negara lain, pendapatan negara sedikit sehingga utang negara bertambah besar, dan perusahaan banyak yang gulung tikar sehingga pengangguran meningkat akibat dari PHK. Untuk mengatasi hal tersebut peran pemerintah sangat diperlukan karena sudah termasuk mengganggu stabilitas ekonomi negara.

⁵³Erlangga Djumena. 2015. *Ekonomi Lesu, 125 Perusahaan Batu Bara Bangkrut, 5.000 Orang Kena PHK*.
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/08/12/060100026/Ekonomi.Lesu.125.Perusahaan.Batu.Bara.Bangkrut.5.000.Orang.Kena.PHK> diakses pada 20 Juni 2016

⁵⁴ Adi Supriyadi. 2016. *Se-ASEAN, Gaji Buruh Indonesia Tergolong Murah*.
<http://www.teropongsenayan.com/29510-kata-serikat-pekerja-upah-murah-buruh-perburuk-ekonomi-indonesia> diakses pada 29 Maret 2016

BAB 5

KESIMPULAN

Perdagangan bebas merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari di era globalisasi ini. Beberapa negara berlomba-lomba untuk melakukan liberalisasi pasar agar pertumbuhan ekonominya meningkat dengan cara kerjasama bilateral, regional maupun multilateral. Salah satu kerjasama regional adalah *China-ASEAN Free Trade Area* (CAFTA). Kerjasama ini mengikat antara China dan negara-negara anggota ASEAN khususnya Indonesia.

Adanya CAFTA ini memberikan dorongan untuk berkompetisi dalam perdagangan bebas dengan China. Tentu saja daya saing yang tidak seimbang dan ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi CAFTA mengalami beberapa dampak negatif yaitu ketergantungan ekonomi, defisit neraca perdagangan, dan deindustrialisasi. Tiga dampak tersebut tidak membuat Indonesia pesimis untuk mengoptimalkan keuntungan atas kerjasama ini.

Oleh karena itu, campur tangan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi dampak negatif ini sangat diperlukan. Sebagai regulator Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Presiden untuk mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu :

1. Deregulasi Pembatasan tarif dan kuota impor
2. Penguatan ekonomi berbasis UMKM
3. Pembangunan infrastruktur

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak negatif CAFTA yang terjadi di Indonesia salah satunya menekan angka impor dari China dan meningkatkan angka ekspor Indonesia ke negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agomo, Moh. Ilyas Purwo. *Jaringan Pesantren dan Kebijakan Public : Studi terhadap Peran Jaringan Pesantren dalam Proses Kebijakan Public di Kota Solo*, Jurusan Ilmu Pemerintahan
- Anderson, James. 1979. *Public Policy Making*, Holt, Rinehart and Winston. New York.
- Arifin, Syamsul., Djaafara, Rizal A., Budiman, Aida S. 2008. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Jakarta: PT Elex Media Computindo
- Arifin, Syamsul., Winantyo, R., Kurniati, Yati. 2004. *Integrasi Keuangan Dan Moneter Di Asia Timur*. Jakarta: PT Elex Media Computindo
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Chung, Chien Peng. 2004. *Southeast Asia-China Relation: Dialectics of 'Hedging and Counter Hedging dalam Southeast Asian Affairs 2004*. Singapura: ISEAS
- Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 2005. Jakarta
- Doering, Detmar. 2010. *Reading in Liberalism*. Jakarta: Freedom Institute
- Hilmawan, Rian., Anwar, Syaiful. 2012. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Telaah Kontemporer*. Tarakan: LPFE Universitas Borneo Tarakan
- Jackson, Robert., Sorensen, Georg. 2010: *Introduction to International Relations Theories and Approaches*. Oxford University Press
- Pujoalwanto, Basuki. 2014. *Perekonomian Indonesia Tinjauan Hisoris, Teoritis, Dan Empiris*. Jogjakarta: Graha Ilmu.

Rais, Muhammad Amien. 2008. *Agenda-Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!*. Jogakarta : PPSK Press

Wahab, Solichin Abdul,. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. 2008. Jogjakarta: CAPS

Internet :

Afrido, Rico. 2013. *Sby Kembali Dengungkan Slogan Zero Enemy Million Friends*. <http://nasional.sindonews.com/read/815880/12/sby-kembali-dengungkan-slogan-zero-enemy-million-friends-1386759948> diakses pada 9 Agustus 2016

Antara. 2009. *Knalpot Mercedes Bens Ternyata Diproduksi Di Purbalingga*. <https://otomotif.tempo.co/read/news/2009/04/23/123172155/knalpot-mercedes-ternyata-diproduksi-di-purbalingga> diakses pada 20 Mei 2016

Aprilia, Eka Utami. 2009. *Tekstil China Kuasai Separuh Pasar Indonesia*. <https://m.tempo.co/read/news/2009/12/03/090211760/tekstil-cina-kuasai-nyaris-separuh-pasar-indonesia> diakses pada 10 Agustus 2016

AS, IW. 2014. *Mewaspada Perlambatan Ekonomi China*. http://www.himiespa.feb.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Kajian-Denda_Feb.pdf diakses pada 2 Mei 2016

ASEAN Free Trade Area (AFTA Council). 2012. *The ASEAN Free Trade AREA (AFTA)*. <http://www.asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/> diakses pada 27 April 2016

ASEAN-China Free Trade Area. 2015. *Building Strong Economic Partnerships*. <http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20ACFTA.pdf> diakses pada 27 April 2016

Asosiasi Pedagang Indonesia. 2010. *UMP DKI naik menjadi Rp 1.920.000,-*. <http://apidki-jakarta.weebly.com/berita/archives/11-2010> diakses pada 5 April 2016

- Azizah, Siti Nur. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Di Pasar Umum Perdana / Initial Public Offering (IPO)*. <http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/49/--sitinurazi-2410-1-13-siti-%29.pdf> diakses pada 3 Juni 2016
- Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK MIC Cikarang. 2013. *Bunuh Diri Perekonomian Indonesia melalui CAFTA*. <http://bem.mic.ac.id/bunuh-diri-perekonomian-indonesia-melalui-acfta.html> diakses pada 5 April 2016
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Apakah Makna Debirokratisasi dan Deregulasi*. http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/186 diakses pada 2 Juni 2016
- Boediono. 2001. *Indonesia Menghadapi Ekonomi Global*. Jogjakarta: BPFE. http://eprints.undip.ac.id/27666/1/Skripsi_Prabowo_Siswanto_C2B607045%28r%29.pdf diakses pada 17 Mei 2016
- Danendra, A.A.G. 2010. *Kerjasama Pemerintah dan Swasta pada Sektor Infrastruktur*. <http://www.kppu.go.id/id/blog/2010/07/kerjasama-pemerintah-dan-swasta-pada-sektor-infrastruktur/> diakses pada 3 Juni 2016
- Departemen Keuangan RI. 2007. *Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Yang Berasal Dari Barang Milik Negara*. <http://mfile.narotama.ac.id/files/M.%20Sholeh/RAPERDA%20PENYERTAAN%20MODAL%20DAERAH%20BERUPA%20ASET%20KEPADA%20PDAM/TATA%20CARA%20PELAKSANAAN%20PENYERTAAN%20MODAL.pdf> diakses pada 3 Juni 2016
- Deutsche Welle (DW). *Krisis China Bisa Lemahkan Ekonomi Dunia*. <http://www.dw.com/id/krisis-cina-bisa-lemahkan-ekonomi-dunia/a-18670531> diakses pada 29 Maret 2016
- Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN DEPLU RI. 2005. *ASEAN Selayang Pandang*. Hlm 100 diakses pada 18 Maret 2016
- Djumena, Erlangga. 2015. *Ekonomi Lesu, 125 Perusahaan Batu Bara Bangkrut, 5.000 Orang Kena PHK*. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/08/12/060100026/Ekonomi.Lesu.125.Perusahaan.Batu.Bara.Bangkrut.5.000.Orang.Kena.PHK> diakses pada 20 Juni 2016

- Dralat, Hary. 2011. *Peringkat Daya Saing Indonesia 2011*. http://www.bappenas.go.id/blog/wpcontent/uploads/2012/10/2_PERINGKAT-DAYA-SAING-INDONESIA-2011-haryDralat.pdf diakses pada 20 Mei 2016
- Edj. 2010. *Produk China Sulit dicegah*. <http://nasional.kompas.com/read/2010/01/14/08475188/produk.china.sulit.dicegah> diakses pada tanggal 2 Juli 2016
- Fauzan, M. Iqbal. Rahmat Romansah. Risma Safutri. Rissa Ladya. *Neraca Perdagangan Indonesia Defisit*. http://www.kompasiana.com/rissasha/neraca-perdagangan-indonesia-defisit_552b85f56ea8346b058b456b diakses pada 5 April 2016
- Febriany, Tri Atika. 2014. *Perdagangan Bebas Asean-China Free Trade Areal (ACFTA) Terkait Industri Dan Iklim Investasi Di Indonesia*” <http://download.portalgaruda.org/article.php%3Farticle%3D141838%26val%3D2342%26title%3DPERDAGANGAN%2520BEBAS%2520A%2520SEAN-CHINA%2520FREE%2520TRADE%2520AREAL%2520> diakses pada 1 Maret 2016
- Gumilar Rusliwa Somantri. 2005. *Memahami Metode Kualitatif* <http://hubsasia.ui.ac.id/index.php/hubsasia/article/viewFile/122/110> diakses pada 17 Maret 2016
- Hendra, Novi. *Teori Sistem Politik (David Easton)*. <http://www.slideshare.net/Hennov/pemikiran-david-easton-teori-sistem> diakses pada 11 April 2016
- Husein, Mohamad Zaki. 2013. *Krisis Mata Uang Rupiah 2013: Penyebab dan Dampaknya*. <http://indoprogress.com/2013/09/krisis-mata-uang-rupiah-2013-penyebab-dan-dampaknya/> diakses pada 26 Maret 2016
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. *KBBI Online*. <http://kbbi.web.id/liberalisasi> diakses pada 18 Maret 2016
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2010. *ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-19 Tahun 2010*. <http://www.kemlu.go.id/Documents/ASP%202010.pdf> diakses pada 9 Maret 2016

- Kementerian Perdagangan. 2010. *ASEAN-China Free Trade Area*. <http://ditjenkpi.kemendag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf> diakses pada 20 Mei 2016
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2012. *Alternative Pembiayaan Infrastrukture*. http://www.bappenas.go.id/files/4313/5228/3148/alternatif-pembiayaan-infrastruktur_20121217143142_3712_2.pdf diakses pada 20 Mei 2016
- Kementerian Perindustrian RI. 2013. *Deindustrialisasi Kembali Intai Indonesia*. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/9202/Deindustrialisasi-Kembali-Intai-Indonesia> diakses pada 17 April 2016
- Kementerian Perindustrian RI. 2016. *Perkembangan Ekspor 31 Kelompok Hasil Industri Ke Negara Tertentu*. http://www.kemenperin.go.id/statistik/query_negara.php?negara=cina&jenis=e diakses pada tanggal 10 Juli 2016
- Koran Republika. 2015. *Menundukkan Sang Naga*. <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/09/21/nv0rok23-menundukkan-sang-naga> diakses pada 2 Mei 2016
- Kurniawan, Ariz. 2015. *5 Pengertian Obligasi dan Saham Beserta Jenis dan Contohnya*. <http://www.gurupendidikan.com/5-pengertian-obligasi-dan-saham-beserta-jenis-dan-contohnya/> diakses pada 3 Juni 2016
- Maryani, H. 2011. *Pengaturan Kesepakatan Perdagangan Bebas Regional Dalam Kerangka WTO*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29019/3/Chapter%20II.pdf> diakses pada 9 maret 2016
- Miller, Eugene F. David Easton's *Political Theory*. 1953. http://www.mmisi.org/pr/01_01/miller.pdf diakses pada 11 April 2016
- Ministry of Foreign Affairs of The Kingdom of Thailand. 2014. *Press Releases : Thailand to host the 8th ASEAN-China Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*. <http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/50708-Thailand-to-host-the-8th-ASEAN-China-Senior-Offici.html> diakses pada 27 April 2016

- Nongsina, Flora Susan. 2007. *Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekspor-Impor Indonesia*. Depok. hlm 4
<http://mukhyi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9106/PENGARUH+KEBIJAKAN+LIBERALISASI+PERDAGANGAN+TERHADAP+LAJU+PERTUMBUHAN+EKSPOR-IMPOR+INDONESIA.pdf>
diakses pada 27 April 2016
- Peraturan Menteri Keuangan RI. 2006. *Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Keramik Tableware*.
<http://www.tarif.depkeu.go.id/Data/Regulation/01-010-06.pdf> diakses pada 2 Juni 2016
- Peraturan Menteri Keuangan RI. 2008. *Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA)*.
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/235~PMK.011~2008Per.htm> diakses pada 2 Juni 2016
- Peraturan Menteri Keuangan RI. 2008. *Pengenaan BMAD Terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara China, India, Rusia, Taiwan, dan Thailand*.
http://hukum.unsrat.ac.id/uang/menkeu_39_2008.pdf diakses pada 20 Mei 2016
- Peraturan Menteri Keuangan RI. 2011. *Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Impor Produk Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain Awning dan Kerai Matahari*
<http://peraturan.bcperak.net/sites/default/files/peraturan/2011/176pmk0112011.pdf> diakses pada 20 Mei 2016
- Peraturan Menteri Keuangan RI. 2011. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/Pmk.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) Dengan Pos Tarif 7312.10.90.00*.
http://repository.beacukai.go.id/peraturan/2012/05/29b1a8c89342-57pmk-011_2012.pdf diakses pada 20 Mei 2016
- Peraturan Menteri Keuangan RI. 2013. *Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canal Lantai Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, Dan Thailand*.
<http://www.tarif.depkeu.go.id/Data/Regulation/PMK1690112013.pdf>
diakses pada 20 Mei 2016

- Peraturan Menteri Keuangan RI. 2014. *Pengenaan BMTP terhadap Impor Produk Canai Lantain dari Besi atau Baja bukan Paduan*
<http://peraturan.bcperak.net/sites/default/files/peraturan/2014/1371pmk0112014.pdf> diakses pada 20 Mei 2016
- Peraturan Presiden. 2010. *Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur*.
http://pkps.bappenas.go.id/attachments/article/836/Perpres_13-2010.pdf diakses pada 3 Juni 2016
- Peraturan Presiden. 2011. *Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur*
<http://prokum.esdm.go.id/perpres/2011/Perpres%2056%202011.pdf> diakses pada 3 Juni 2016
- PKPS Bappenas. 2015. *Proyek didanai Swasta Senilai US\$ 21 Miliar*.
<http://pkps.bappenas.go.id/index.php/en/berita/143-berita-internal/1299-proyek-didanai-swasta-senilai-us23-miliar> diakses pada tanggal 11 Agustus 2016
- Purwanti, Evi Yulia. 2006. *Dinamika Pembangunan Vol. 3 No. 2 : Analisis Realisasi Impor Non Migas Jawa Tengah*. Hlm 120 diakses pada 20 Mei 2016
- Puspitasari, Sulusi Prabawati. 2014. *Peluang Memperkuat Daya Saing Hortikultura Dalam Kerangka Asean - China Free Trade Agreement (Acfta)*.
http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/memperkuat_dayasaing_produk_pe/BAB-IV-2.pdf diakses pada 27 April 2016
- R. Ghita Intan Permatasari. 2011. *Kerajinan Tangan & Fesyen Penggerak Roda Ekspor*.
<http://economy.okezone.com/read/2011/11/24/320/533784/kerajinan-tangan-fesyen-penggerak-roda-ekspor> diakses pada 20 Mei 2016
- Rahman, Eko Nur. 2014. *Dana Dukungan Tunai Infrastruktur (Viability Gap Fund): Harapan Baru Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*.
<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/dana-dukungan-tunai-infrastruktur-viability-gap-fund-harapan-baru-pembangunan-infrastruktur> Diakses pada 20 Mei 2016

- Sakina Rakhma Diah Setiawan. 2015. *Pengusaha Bajaj dan Pengrajin Tahu Tempe Dapat* KUR. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/28/141200026/Pengusaha.Bajaj.dan.Perajin.Tahu.Tempe.Dapat.KUR> diakses pada tanggal 11 Agustus 2016
- Sarwendah Okky Liesindriyati, Djoko Susilo. 2013. *Keputusan Uni Eropa Memberikan Financial Assistance Package Kepada Yunani Pada Tahun* 2010. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58880/Sarwendah%20Okky%20Liesindriyati.pdf?sequence=1> diakses pada 23 Maret 2016
- Sasa. 2015. *Ambruknya Ekonomi Cina dan Dampaknya Terhadap Krisis Ekonomi Indonesia.* <http://www.voa-islam.com/read/politik-indonesia/2015/10/20/39970/ambruknya-ekonomi-cina-dan-dampaknya-terhadap-krisis-indonesia/#sthash.aMlcsDgG.dpbs> diakses pada 2 Mei 2016
- Self, Andrew. 2015. *Resep IMF di Amerika Latin Terbukti Membunuh.* <http://www.berdikarionline.com/resep-imf-di-amerika-latin-terbukti-membunuh/> diakses pada 26 Maret 2016
- Setiawan, Sakina Rakhma Diah. 2015. *Pengusaha Bajaj dan Pengrajin Tahu Tempe Dapat* KUR. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/28/141200026/Pengusaha.Bajaj.dan.Perajin.Tahu.Tempe.Dapat.KUR> diakses pada tanggal 11 Agustus 2016
- Siwi, Arisa Permata. 2013. *Bilateral Free Trade : Hubungan Perdagangan Indonesia-China dalam Kerangka ACFTA.* <http://journal.unair.ac.id/bilateral-free-trade-article-5715-media-131-category-8.html> diakses pada tanggal 10 April 2016
- Sobri, 1987. *Ekonomi Makro.* Jogjakarta: BPFE UII. <https://eprints.uns.ac.id/8648/3/91800308200902403.pdf> diakses pada 5 April 2016
- Somantri, Gumilar Rusliwa. *Memahami Metode Kualitatif.* <http://journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/viewFile/122/118> diakses pada 17 Maret 2016

- ST, Aznil. 2015. *30 Prestasi "Gila" Presiden Jokowi 1 Tahun*. http://www.kompasiana.com/aznil/30-prestasi-gila-presiden-jokowi-1-tahun_56259e3a109773f10b3673f0 diakses pada tanggal 11 Agustus 2016
- Sudaryanto, Ragimun, Rahma Rina Wijayanti. *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi pasar Bebas ASEAN*. <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Strategi%20Pemberdayaan%20UMKM.pdf> diakses pada 20 Mei 2016
- Sudjatmiko, Budiman. 2010. *Apakah di mungkin win-win solution? Pro dan kontra Asean China Free Trade Agreement (ACFTA)*. <http://www.fes.or.id/fes/download/Undangan-ACFTA%20TOR.pdf> diakses pada 5 April 2016
- Supriyadi, Adi. 2016. *Se-ASEAN, Gaji Buruh Indonesia Tergolong Murah*. <http://www.teropongsenayan.com/29510-kata-serikat-pekerja-upah-murah-buruh-perburuk-ekonomi-indonesia> diakses pada 29 Maret 2016
- Susilo Bambang Yudhoyono. 2013. *Twitter*. <https://twitter.com/sbyudhoyono/status/325631618033283072> diakses pada 9 Agustus 2016
- Susilowati, Dwi. 2011. *Negara Sedang Pembangunan*. <http://susilowati.staff.umm.ac.id/files/2011/03/BAB-III.pdf> diakses pada 29 Mei 2016
- The Worldbank Organization. 2012. *Setelah Lima Tahun, PNPM Mandiri menjadi Bagian Penting dalam Upaya Pengembangan Masyarakat di Seluruh Indonesia*. <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2012/08/07/after-five-years-PNPM-Mandiri-becomes-an-integral-part-for-the-development-of-communities-across-indonesia0> diakses pada tanggal 11 Agustus 2016
- Undang-undang RI. 2008. *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf> diakses pada 20 Mei 2016

VOA. 2016. *Laporan World Economic Forum: Peringkat Daya Saing Indonesia Naik.* <http://www.voaindonesia.com/content/peringkat-daya-saing-indonesia-naik--102985779/83786.html> diakses pada 20 Mei 2016

